

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

HASIL PEMERIKSAAN

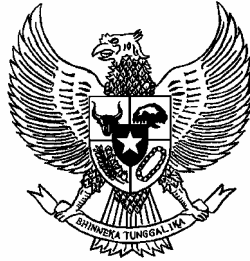
ATAS

**PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
KEPALA DAERAH (PILKADA)
TAHUN 2005**

PADA

**KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD)
DAN PANITIA PENGAWAS (PANWAS)
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
DI
TALIWANG**

**PERWAKILAN BPK RI
DI DENPASAR**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

HASIL PEMERIKSAAN

ATAS

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

KEPALA DAERAH (PILKADA)

TAHUN 2005

PADA

KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD)

DAN PANITIA PENGAWAS (PANWAS)

KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DI

TALIWANG

PERWAKILAN BPK RI

DI DENPASAR

Nomor : 84/S/XIV.5/02/2006

Tanggal : 24 Februari 2006

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
SIMPULAN PEMERIKSAAN	1
BAB I GAMBARAN UMUM	3
A. DASAR PEMERIKSAAN	3
B. TUJUAN PEMERIKSAAN	3
C. JENIS PEMERIKSAAN	3
D. STANDAR PEMERIKSAAN	4
E. METODE PEMERIKSAAN	4
F. OBYEK PEMERIKSAAN	4
G. LINGKUP PEMERIKSAAN	4
BAB II HASIL PEMERIKSAAN ATAS EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN	7
A. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	7
B. PENGELOLAAN KAS	8
C. PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	10
D. PEMBUKUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN	11
BAB III HASIL PEMERIKSAAN ATAS KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	13
A. KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KABUPATEN SUMBAWA BARAT	13
1. Pengadaan kartu pemilih dan surat suara berlebih masing-masing sebanyak 3.193 dan 1.753 buah, sehingga memboroskan keuangan daerah seluruhnya sebesar Rp4.992.955,00	13
2. Sisa Dana Pilkada Tahun 2005 sebesar Rp107.457.488,00 pada KPUD Kabupaten Sumbawa Barat belum disetor ke Kas Daerah	17
3. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat KPUD dan PPK Kabupaten Sumbawa Barat sebesar Rp225.485.000,00 tidak didukung bukti yang memadai	19
4. PPh sebesar Rp5.240.835,00 atas kegiatan Pilkada kurang dan belum dipungut, serta PPh dan PPN sebesar Rp7.841.000,00 terlambat	21

disetor ke Kas Negara	
5. Sisa barang persediaan pakai habis kegiatan Pilkada Tahun 2005 senilai Rp16.712.203,14 pada KPUD Kabupaten Sumbawa Barat belum diserahkan	24
6. Pengeluaran untuk Pengadaan Kartu Pemilih sebesar Rp76.077.000,00 tidak dicatat dalam Buku Kas Umum dan tidak disajikan dalam laporan realisasi anggaran KPUD	26
B. PANITIA PENGAWAS (PANWAS) PILKADA KABUPATEN SUMBAWA BARAT	31
1. Dana sebesar Rp9.000.000,00 pada Panitia Pengawas Kabupaten Sumbawa Barat belum dipertanggungjawabkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja Perjalanan Dinas pada	31
2. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja Perjalanan Dinas pada Panitia Pengawas Kabupaten Sumbawa Barat sebesar Rp15.550.000,00 tidak didukung bukti yang memadai	32
LAMPIRAN-LAMPIRAN	34
Lampiran 1 : Laporan Rekapitulasi Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Belanja Pilkada Tahun 2005 pada Kabupaten Sumbawa Barat	
Lampiran 2 : Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pilkada Tahun 2005 pada Kabupaten Sumbawa Barat	
Lampiran 3 : Laporan Realisasi Belanja Per Kegiatan Pilkada Tahun 2005 Kabupaten Sumbawa Barat	
Lampiran 4 : Laporan Realisasi Belanja Barang Dan Jasa Pilkada Tahun 2005 pada KPUD Kabupaten Sumbawa Barat	
Lampiran 5 : Daftar Bukti SPPD yang tidak memenuhi persyaratan pada KPUD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2005	
Lampiran 6 : Laporan Sisa Barang Persediaan Pakai Habis pada KPUD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2005	
Lampiran 7 : Daftar Bukti SPPD yang tidak memenuhi persyaratan pada Panwas Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2005	



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI
PERWAKILAN BPK RI DI DENPASAR**

Jl. D.I. Panjaitan, Renon, Telp. (0361) 229193 Fax (0361) 229184 Denpasar Bali

Nomor : 84/S/XIV.5/02/2006
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban
Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2005 pada
KPUD dan Panwas Kabupaten Sumbawa
Barat di Taliwang
(tanggal 05 s.d. 24 Desember 2005)

Denpasar, 24 Februari 2006

Kepada Yth.

- 1. Bupati Sumbawa Barat**
 - 2. Ketua KPUD Kabupaten Sumbawa Barat**
- di**
Taliwang

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan seperti tersebut pada pokok surat ini, maka tanpa mengurangi banyaknya keberhasilan yang telah dicapai, dikemukakan antara lain hal-hal sebagai berikut:

1. Sisa Dana Pilkada Tahun 2005 sebesar Rp107,46 juta pada KPUD Kabupaten Sumbawa Barat belum disetor ke Kas Daerah, mengakibatkan tidak dapat segera dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dan membuka peluang untuk disalahgunakan.
2. PPh sebesar Rp5,24 juta atas kegiatan Pilkada kurang dan belum dipungut, mengakibatkan kerugian keuangan negara, serta PPh dan PPN sebesar Rp7,84 juta terlambat disetor ke Kas Negara, mengakibatkan tertundanya penerimaan negara dan membuka peluang disalahgunakan.
3. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sumbawa Barat belum mempertanggungjawabkan dana sebesar Rp9,00 juta, mengakibatkan terjadinya peluang penyalahgunaan dana Pilkada dimaksud.

Hal tersebut di atas karena:

1. Kelalaian Bendahara dan Sekretaris KPUD Kabupaten Sumbawa Barat sebagai Atasan Langsung Bendahara tidak segera menyetor sisa dana Pilkada ke Kas Daerah.
2. Kelalaian Bendahara KPUD dan Para Penanggung Jawab Kegiatan Operasional Pilkada terhadap ketentuan perpajakan dalam mengenakan, memungut, dan menyetor kewajiban perpajakan secara benar dan tepat waktu.
3. Kebijakan dari mantan Ketua Panwas Kabupaten Sumbawa Barat untuk segera memenuhi kebutuhan komputer dalam menunjang operasional Panwas dalam menyetujui pembayaran sebesar Rp9,00 juta tanpa dilengkapi bukti yang definitif, kelalaian dari Agus Sudono, mantan Anggota Panwas Kabupaten Sumbawa Barat yang tidak segera menyampaikan surat pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut, dan kelalaian mantan Bendahara Panwas Kabupaten Sumbawa Barat dalam melakukan pembayaran kepada pihak ketiga belum dilengkapi bukti yang memadai.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Badan Pemeriksa Keuangan menyarankan kepada :

1. Bupati Sumbawa Barat agar memberi sanksi kepada Bendahara dan Sekretaris KPUD Kabupaten Sumbawa Barat atas kelalaiannya dalam menyetorkan Sisa Kas Daerah tidak tepat waktu dan selanjutnya memerintahkan Bendahara dan Sekretaris KPUD Kabupaten Sumbawa Barat segera menyetor sisa dana Pilkada sebesar Rp107,46 juta ke Kas Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

2. Bupati Sumbawa Barat memerintahkan Sekretaris KPUD Sumbawa Barat menarik pajak yang kurang dan belum dipungut sebesar Rp5,24 juta dan menyetor ke Kas Negara, serta memberi sanksi Bendahara KPUD atas keterlambatannya dalam memungut dan menyetor pajak sebesar Rp7,84 juta.

3. Bupati Sumbawa Barat agar menegur mantan Bendahara Panwas, mantan Ketua Panwas, dan mantan Anggota Panwas An. Agus Sudono atas kelalaiannya dalam menggunakan anggaran Panwas yang tidak berdasarkan DASK Panwas Kabupaten Sumbawa Barat, dan selanjutnya segera melengkapi SPJ terhadap pengadaan komputer dan printer tersebut.

Untuk lebih jelasnya dipersilakan menelaah hasil pemeriksaan lengkap terlampir, dan Badan Pemeriksa Keuangan mengharapkan Bupati Sumbawa Barat dan Ketua KPUD Kabupaten Sumbawa Barat dapat menyampaikan jawaban atas penyelesaian masalah-masalah tersebut selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan sejak diterimanya surat ini.

Atas perhatian yang diberikan, diucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI
KEPALA PERWAKILAN BPK RI
DI DENPASAR**

**DRS. A.M. ALIMUDDIN
NIP.240001515**

Tembusan :

1. Yth. Wakil Ketua BPK RI, di Jakarta;
2. Yth. Anggota/Pembina Auditama Keuangan Negara IV BPK RI, di Jakarta;
3. Yth. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri, di Jakarta;
4. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara IV BPK RI, di Jakarta;
5. Yth. Inspektur Utama Renalev BPK RI, di Jakarta;
6. Yth. Inspektur Utama Wasinsus BPK RI, di Jakarta;
7. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, di Taliwang;
8. Yth. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, di Taliwang.



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SIMPULAN PEMERIKSAAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan RI, dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK RI telah melakukan pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2005 pada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Panitia Pengawas (Panwas) Kabupaten Sumbawa Barat.

Pemeriksaan BPK RI bertujuan untuk menguji dan menilai apakah Sistem Pengendalian Intern (SPI) Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pilkada yang diatur dalam berbagai peraturan perundangan-undangan telah dilaksanakan secara memadai serta KPUD dan Panwas Kabupaten Sumbawa Barat dalam melaksanakan kegiatannya telah mematuhi persyaratan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan tertentu.

BPK RI melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Audit Pemerintahan (SAP) BPK RI Tahun 1995. Standar tersebut mengharuskan pemeriksaan direncanakan dan dilaksanakan agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa simpulan BPK RI telah didukung bukti kompeten yang cukup dan relevan.

Terhadap Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2005 pada Kabupaten Sumbawa Barat, BPK RI menyimpulkan bahwa:

1. Efektivitas atas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern yang terdiri dari:
 - a. Perencanaan dan Penganggaran kurang memadai;

- b. Pengelolaan Kas kurang memadai;
 - c. Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa kurang memadai;
 - d. Pembukuan dan Pertanggungjawaban kurang memadai.
2. Hasil Pemeriksaan atas ketaatan terhadap peraturan peundang-undangan, ditemukan penyimpangan senilai Rp468.356.481,14 atau 25,57% dari realisasi belanja sebesar Rp1.831.339.020,00, terdiri dari:
- a. Penyimpangan yang berindikasi Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp5.240.835,00.
 - b. Penyimpangan administrasi sebesar Rp433.569.488,00.
 - c. Penyimpangan kehematan dan efisiensi sebesar Rp4.992.955,00.
 - d. Penyimpangan efektivitas sebesar Rp24.553.203,14.

Berkenan dengan hal tersebut di atas, BPK RI menyarankan agar dilakukan review atas kelemahan pelaksanaan SPI, mempertanggungjawabkan indikasi kerugian keuangan negara dengan menagih dan menyetorkan ke kas negara, serta memperbaiki penyimpangan administrasi dan kepada para pelaksana dan penanggung jawab kegiatan pengelolaan Belanja Pilkada yang lalai melaksanakan tugas dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk lebih jelasnya, dipersilakan menelaah hasil pemeriksaan ini dan BPK RI mengharapkan Bupati dan Ketua KPUD Kabupaten Sumbawa Barat dapat menindaklanjuti dan menyampaikan hasilnya kepada Perwakilan BPK RI di Denpasar dalam waktu satu bulan sejak laporan ini diterima.

Denpasar, Februari 2006

**PENANGGUNG JAWAB,
KEPALA PERWAKILAN BPK RI
DI DENPASAR**

**DRS. A.M. ALIMUDDIN
NIP.240001515**

BAB I

GAMBARAN UMUM

A. DASAR PEMERIKSAAN

Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pilkada pada KPUD dan Panwas Kabupaten Sumbawa Barat dilakukan berdasarkan:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23E;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan RI;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Pemilihan Pengesahan Pengangkatan dan Perberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005.

B. TUJUAN PEMERIKSAAN

Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2005 bertujuan untuk menguji dan menilai apakah:

1. Sistem Pengendalian Intern (SPI) Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pilkada yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan secara memadai.
2. KPUD dan Panwas Kabupaten Sumbawa Barat dalam melaksanakan kegiatannya telah mematuhi persyaratan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu.

C. JENIS PEMERIKSAAN

Sesuai dengan tujuan pemeriksaan tersebut, maka jenis pemeriksaan yang dilaksanakan adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

D. STANDAR PEMERIKSAAN

Standar yang digunakan dalam pemeriksaan adalah Standar Audit Pemerintahan (SAP) BPK RI Tahun 1995.

E. METODE PEMERIKSAAN

Metode pemeriksaan dilakukan antara lain dengan:

1. Pengumpulan dan analisa data untuk mencapai tujuan audit.
2. Pengumpulan data dilakukan dengan pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik, dan tanya jawab.
3. Metode analisa yang digunakan oleh auditor adalah analisa prosedur, pengujian data, analisis hasil, survai, dan analisis kuantitatif.
4. Pemeriksaan dilakukan terhadap total realisasi anggaran pada unit yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dalam penyelenggaraan Pilkada.

F. OBYEK PEMERIKSAAN

Obyek Pemeriksaan adalah Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2005 pada KPUD dan Panwas Kabupaten Sumbawa Barat.

G. LINGKUP PEMERIKSAAN

Lingkup pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2005 Kabupaten Sumbawa Barat hanya mencakup dana Penyelenggaraan Pilkada oleh KPUD dan Panwas Kabupaten Sumbawa Barat.

Luas cakupan pemeriksaan adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Nilai Yang Diaudit (Rp)	Cakupan Audit (%)
I	KPUD					
1	Penerimaan	2.408.585.960	1.638.635.450	68,03%	1.638.635.450	100,00%
2	Belanja:					
	Belanja Pegawai	843.700.000	606.900.000	71,93%	606.900.000	100,00%
	Belanja Barang & Jasa	320.410.900	207.229.280	64,68%	207.229.280	100,00%
	Belanja Operasi	1.102.212.700	694.826.300	63,04%	694.826.300	100,00%
	Belanja Kontijensi	142.262.360	29.672.500	20,86%	29.672.500	100,00%
	Jumlah Belanja KPUD	2.408.585.960	1.538.628.080	63,88%	1.538.628.080	100,00%
II	PANWAS					
1	Penerimaan	379.816.000	301.711.000	79,44%	301.711.000	100,00%
2	Belanja:					
	Belanja Pegawai	105.300.000	105.300.000	100,00%	105.300.000	100,00%
	Belanja Barang & Jasa	6.000.000	6.000.000	100,00%	6.000.000	100,00%
	Belanja Operasi	243.560.000	156.455.000	64,24%	156.455.000	100,00%
	Belanja Kontijensi	24.956.000	24.955.940	100,00%	24.955.940	100,00%
	Jumlah Belanja Panwas	379.816.000	292.710.940	77,07%	292.710.940	100,00%
	Jml Penerimaan I + II	2.788.401.960	1.940.346.450	147,47%	1.940.346.450	100,00%
	Jml Belanja I + II	2.788.401.960	1.831.339.020	140,95%	1.831.339.020	100,00%

DAFTAR REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA DALAM SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2005

KPUD/Panwas Kabupaten Sumbawa Barat
Tahun Anggaran 2005

(nilai dalam juta rupiah)

No	Nama Obrik/Sasaran	Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi	Nilai yang diperiksa	% Carik	Total Nilai Temuan yang Ditemukan pada Saat Pemeriksaan		Rincian Temuan															Pendapat Opini (Audit Atas Lapku)	Tingkat Pencapaian Kinerja		Usulan Pokok Temuan Bhtisar Hapssem				
								Keterlibatan dan Ketaatan (2K)									Jumlah 2K			Khematan dan Efisiensi				Efektivitas			Pemeriksaan Kinerja			
								Indikasi Kerugian			Kekurangan Penerimaan			Administrasi			Jml	Nilai	%	Jml	Nilai	%		Jml	Nilai		%	Jml	Nilai	%
Jml	Nilai	%	Jml	Nilai	%	Jml	Nilai	%	Jml	Nilai	%	Jml	Nilai	%	Jml	Nilai	%	Jml	Nilai	%	Jml	Nilai	%	%	Sebulan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13=12:5	14	15	16=15:5	17	18	19=18:5	20	21	22=21:5	23	24	25=24:5	26	27	28=27:5	29	30	31	32
I.	Pemeriksaan dengan tujuan tertentu	2.788,40	1.831,34	1.831,34	100,00	8	468,36	25,57%	1	5,24	0,29%	-	-	0,00%	5	433,57	23,67%	6	438,81	23,96%	1	4,99	0,27%	1	24,55	1,34%	-	-	-	-
1	Pengadaan kartu pemilih dan surat suara berlebih masing-masing sebanyak 3.193 dan 1.753 buah, sehingga memboroskan keuangan daerah seluruhnya sebesar Rp4,99 juta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sisa Kas Pilkada pada KPUD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2005 belum disetor ke Kas Daerah sebesar Rp107,46 juta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	107,46	-	-	-	107,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TP 2: 107,46
3	Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat KPUD dan PPK Kabupaten Sumbawa Barat sebesar Rp225,49 juta tidak didukung bukti yang memadai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	225,49	-	-	-	225,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	PPh sebesar Rp5,24 juta atas kegiatan Pilkada kurang dan belum dipungut, serta PPh dan PPN sebesar Rp7,84 juta terlambat disetor ke Kas Negara	-	-	-	-	-	-	-	1	5,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,24	-	-	-	1	7,84	-	-	-	-	TP 4: 13,08
5	Sisa barang persediaan pakai habis kegiatan Pilkada Tahun 2005 senilai Rp16,71 juta pada KPUD Kabupaten Sumbawa Barat belum diserahkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	16,71	-	-	-	-	-	-
6	Pengeluaran untuk Pengadaan Kartu Pemilih sebesar Rp76,08 juta tidak dicatat dalam Buku Kas Umum dan tidak disajikan dalam laporan realisasi anggaran KPUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	76,08	-	-	-	76,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Dana sebesar Rp9,00 juta pada Panitia Pengawas Kabupaten Sumbawa Barat belum dipertanggungjawabkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9,00	-	-	-	9,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TP 7: 9,00 jt
8	Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja Perjalanan Dinas pada Panwas Kabupaten Sumbawa Barat sebesar Rp15,55 juta tidak didukung bukti yang memadai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15,55	-	-	-	15,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	2.788,40	1.831,34	1.831,34	100%	8	468,36	25,57%	1	5,24	0,29%	-	-	0,00%	5	433,57	23,67%	6	438,81	23,96%	1	4,99	0,27%	1	24,55	1,34%				

BAB II
HASIL PEMERIKSAAN
ATAS EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Hasil pengujian Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) atas Pengelolaan Belanja Pilkada Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2005 mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

A. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Belanja Pilkada Tahun 2005 pada Kabupaten Sumbawa Barat dibebankan dalam APBD yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Operasi, dan Belanja Kontijensi. Proses perencanaan dan penganggaran kegiatan Pilkada dilakukan oleh KPUD dan Panwas Kabupaten Sumbawa Barat dengan menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada berdasarkan prestasi kerja yang ingin dicapai dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, transparan, dan akuntabel. Penyusunan RKA Pilkada oleh KPU Kabupaten Sumbawa Barat mencakup kegiatan dan penganggaran belanja KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS. Sedangkan penyusunan RKA oleh Panwas Kabupaten Sumbawa Barat mencakup penganggaran Panwas Kabupaten dan Panwas Kecamatan di Kabupaten bersangkutan. Selanjutnya Ketua KPUD dan Ketua Panwas Kabupaten Sumbawa Barat mengajukan RKA kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada DPRD, dan selanjutnya RKA dimaksud dibahas bersama oleh Tim Anggaran Eksekutif (TAE) dengan KPUD dan Panwas. Pembahasan ini untuk menilai kesesuaian dengan rincian kebutuhan belanja, standar harga satuan, tingkat kewajaran, dan kepatutan antara beban tugas dan belanja yang direncanakan dikaitkan dengan prestasi kerja yang akan dicapai/dihasilkan. RKA yang telah dibahas disusun dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Sekretariat Daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RASK Sekretariat Daerah. RASK tersebut terdiri dari RASK untuk belanja KPU Kabupaten dan RASK untuk belanja Panwas Kabupaten yang dirinci menurut

kelompok belanja, jenis belanja, obyek belanja, sampai dengan rincian obyek belanja sesuai dengan rekening berkenan.

Penganggaran belanja Pilkada Tahun 2005 dalam APBD Kabupaten Sumbawa Barat dialokasikan dalam anggaran Sekretariat Daerah yang dimuat dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK), dengan Jenis Belanja Bantuan Keuangan pada Obyek Belanja Pilkada dengan rincian Obyek Belanja KPUD dan Obyek Belanja Panwas.

Pada umumnya, proses perencanaan dan penganggaran belanja Pilkada Tahun 2005 pada Kabupaten Sumbawa Barat telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2005 Jo. Permendagri Nomor 21 Tahun 2005. Namun demikian, pengujian BPK RI mengungkapkan bahwa perencanaan dan penganggaran belanja Pilkada Kabupaten Sumbawa Barat dilaksanakan kurang efektif terhadap pembahasan RASK KPUD dan Panwas ke dalam APBD. Hal tersebut diketahui sesuai alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2005 tanggal 8 Februari 2005 untuk belanja Pilkada KPUD sebesar Rp2.943.228.750,00, yang mencakup Belanja Pilkada sebesar Rp1.527.049.477,00 dan Belanja Penunjang Kegiatan Pilkada sebesar Rp1.416.179.273,00. Sedangkan alokasi anggaran Belanja Pilkada sesuai DASK KPUD yang ditetapkan sebesar Rp2.408.585.960,00, sudah mencukupi untuk mendanai seluruh kegiatan Pilkada Tahun 2005. Demikian juga alokasi anggaran dalam APBD untuk belanja Panwas sebesar Rp400.000.000,00, sesuai DASK Panwas yang ditetapkan sebesar Rp379.816.000,00, sudah mencukupi untuk mendanai seluruh kegiatan Pilkada Panwas Tahun 2005. Di samping itu, penetapan DASK dilaksanakan terlambat, yaitu tanggal 20 Juni 2005 untuk DASK KPUD, dan tanggal 17 April untuk DASK Panwas.

B. PENGELOLAAN KAS

Ketua KPUD dan Ketua Panwas Kabupaten Sumbawa Barat telah menetapkan Bendahara dan atasan langsung Bendahara dengan Surat Keputusan. Adapun tugas dan tanggungjawab atasan langsung Bendahara antara lain melakukan pengendalian

terhadap penggunaan anggaran dan melakukan pemeriksaan kas Bendahara sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sedangkan tugas dan tanggungjawab Bendahara KPUD dan Bendahara Panwas antara lain adalah melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai dengan perintah bayar atasan langsung Bendahara, bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola, dan bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

Pengelolaan Belanja Pilkada pada KPUD dan Panwas Kabupaten Sumbawa Barat dilakukan masing-masing oleh Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD dan Panwas Kabupaten Sumbawa Barat yang ditunjuk dan ditetapkan masing-masing dengan SK KPUD Kabupaten Sumbawa Barat No. 02 Tahun 2005 dan SK Panwas Pilkada Kabupaten Sumbawa Barat No. 01/Panwas-KSB/IV/2005. Pasal 21 Permendagri No. 12 Tahun 2005 Jo. Permendagri No. 21 Tahun 2005 telah mengatur bahwa Kepala Daerah menetapkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) sebagai dasar pelaksanaan belanja Pilkada yang tercantum dalam DASK. SKO asli disampaikan kepada Sekretaris Daerah dan salinannya disampaikan kepada Ketua KPUD dan Ketua Panwas.

Sistem pembayaran atas beban belanja Pilkada diatur dengan cara penerbitan Surat Perintah Membayar Beban Tetap (SPM BT) dan Surat Perintah Membayar Pengisian Kas (SPM PK). Dalam rangka pengisian kas Bendahara KPUD dan/atau Bendahara Panwas telah diatur bahwa Ketua KPUD atau Ketua Panwas mengajukan permintaan dana kepada Sekretaris Daerah melalui Bendahara Sekretariat Daerah, dengan jumlah untuk pengisian kas tahap pertama paling tinggi 15% dari anggaran yang tercantum dalam DASK. Berdasarkan surat permintaan dana tersebut, Bendahara Sekretariat Daerah mengajukan SPP PK kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai dasar untuk menerbitkan SPM PK. Pengajuan surat permintaan dana untuk pengajuan kas tahap berikutnya telah diatur paling tinggi sebesar atas uang yang telah dipertanggungjawabkan. Selain itu diatur pula bahwa pengajuan surat permintaan dana

untuk pengisian kas tahap berikutnya wajib dilampirkan dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah atas beban pengisian kas sebelumnya.

Pada umumnya, pengelolaan kas belanja Pilkada Tahun 2005 pada Kabupaten Sumbawa Barat telah memadai sesuai ketentuan yang diatur dalam Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2005 Jo. Permendagri Nomor 21 Tahun 2005. Namun demikian, dari pengujian BPK RI mengungkapkan bahwa pelaksanaan sistem pengelolaan kas masih terdapat kelemahan, yaitu:

1. Penerbitan SPM oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sumbawa Barat dalam semua tahap pencairan dana hanya didasarkan pada Rencana Penggunaan Uang (RPU). Seharusnya RPU hanya digunakan pada saat permintaan dana untuk pengisian kas pertama kali. Sedangkan penerbitan SPM tahap berikutnya, harus dilakukan untuk mengganti SPJ atas penggunaan dana dari pengisian kas sebelumnya yang telah disahkan oleh fungsi verifikasi.
2. Penyampaian SPJ oleh KPUD atas penggunaan dana yang dicairkan dengan SPM-PK sebelumnya dan pengesahan SPJ oleh fungsi verifikasi pada BPKD belum pernah dilaksanakan, dimana SPJ atas pengisian kas seluruhnya masih berada pada Bendahara KPUD.
3. Terdapat dua kali penerbitan SPM untuk pengisian kas yang dilakukan dengan menerbitkan SPM Beban Tetap, dimana seharusnya semua SPM untuk pengisian kas dilakukan dengan SPM Pengisian Kas.
4. Pengeluaran untuk pengadaan kartu pemilih yang dibayarkan dengan SPM Beban Tetap sebesar Rp76.077.000,00 tidak dicatat dalam Buku Kas Umum, sebagaimana disajikan dalam Catatan Pemeriksaan No. 6.

C. PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2005, Sekretaris KPUD Kabupaten Sumbawa Barat dengan SK No. 33A/Sekr-KPU/5/2005 Tanggal 12 Mei 2005 telah membentuk dan menetapkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam SK ini telah

ditetapkan mengenai tugas pokok panitia adalah menyiapkan seluruh dokumen serta semua jenis perlengkapan administrasi pada Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara pada Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2005.

Pada umumnya, pengadaan barang dan jasa untuk pelaksanaan Belanja Pilkada sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Permendagri Nomor 12 Tahun 2005 Jo. Permendagri Nomor 21 Tahun 2005, yaitu dalam ketentuan diatur bahwa pengadaan barang dan jasa supaya berpedoman pada Peraturan Presiden RI No. 32 Tahun 2005 tentang perubahan atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun demikian, pengujian BPK RI mengungkapkan bahwa dalam pengadaan Jasa Akuntan Publik dilaksanakan kurang memadai, yaitu Panitia Pengadaan tidak membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atas pengadaan jasa akuntan dimaksud.

D. PEMBUKUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur dilakukan terhadap setiap transaksi pembayaran dan penerimaan atas belanja pilkada Tahun 2005 yang dilaksanakan oleh Bendahara KPUD dan Bendahara Panwas Kabupaten Sumbawa Barat. Adapun model Buku Kas Umum yang diselenggarakan mempedomani Manual Adminitrasi Keuangan Daerah dalam hal ini adalah Buku Kas Umum.

Sedangkan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Belanja Pilkada oleh KPUD dan Panwas Kabupaten Sumbawa Barat dilakukan mengacu pada Surat Edaran Dirjen BAKD, dimana KPUD dan Panwas Provinsi/Kabupaten/Kota diharuskan menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pilkada yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Penerimaan dan Belanja Pilkada
 - a. Laporan Rekapitulasi Realisasi Penerimaan dan Belanja Pilkada
 - b. Laporan Realisasi Belanja Pilkada perkegiatan
 - c. Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas
 - d. Laporan Daftar Kewajiban yang belum diselesaikan
2. Laporan Realisasi Belanja Barang Barang dan Jasa Pilkada

- a. Laporan Realisasi Belanja Barang Inventaris/Modal
 - b. Laporan Realisasi Barang Persediaan Pakai habis
 - c. Laporan Realisasi Pengadaan dan Penggunaan Jasa
3. Berita Acara Penyerahan Barang ke Pemda

Pada umumnya, pelaksanaan pencatatan/pembukuan telah dilakukan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi pembayaran dan penerimaan atas belanja pilkada Tahun 2005 yang harus dilaksanakan oleh Bendahara KPUD dan Bendahara Panwas diatur dalam Pasal 19 ayat 3 butir b Permendagri Nomor 12 Tahun 2005 Jo. Permendagri Nomor 21 Tahun 2005. Sedangkan penyusunan laporan Belanja Pilkada sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Dirjen BAKD Nomor 279/536/BAKD tanggal 23 Agustus 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Belanja Pilkada, KPUD dan Panwas Provinsi/Kabupaten/Kota. Namun demikian, pengujian BPK RI mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaannya, pembukuan dan pertanggungjawaban mengandung kelemahan, yaitu Bendahara KPUD terlambat dalam membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pilkada, yang seharusnya telah diselesaikan pada bulan Nopember 2005, tetapi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pilkada (*sesuai Lampiran 1 s.d. Lampiran 4*), baru diselesaikan bulan Desember 2005 pada saat berakhirnya pemeriksaan BPK RI. Disamping itu, terdapat belanja untuk pengeluaran untuk pengadaan kartu pemilih sebesar Rp76.077.000,00 tidak disajikan dalam laporan keuangan Pilkada KPUD, sebagaimana disajikan dalam Catatan Pemeriksaan No. 6.

Sehubungan dengan hal tersebut, BPK RI menyarankan agar Bupati dan KPUD Kabupaten Sumbawa Barat melakukan review atas kelemahan dalam pelaksanaan sistem perencanaan dan penganggaran, sistem pengelolaan kas, sistem pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa, dan sistem pembukuan dan pertanggungjawabannya kembali.

BAB III
HASIL PEMERIKSAAN ATAS KETAATAN
TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Hasil pemeriksaan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan atas pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan Pilkada Tahun 2005 pada KPUD dan Panwas Kabupaten Sumbawa Barat mengungkapkan masing-masing 6 temuan senilai Rp443.806.481,14 dan 2 temuan senilai Rp24.550.000,00 dengan uraian temuan sebagai berikut:

A. KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KABUPATEN SUMBAWA BARAT

- 1. Pengadaan kartu pemilih dan surat suara berlebih masing-masing sebanyak 3.193 dan 1.753 buah, sehingga memboroskan keuangan daerah seluruhnya sebesar Rp4.992.955,00**

Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Keuangan Pilkada Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2005 diketahui bahwa dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) KPUD penganggaran untuk pengadaan barang cetak surat suara sebesar Rp106.246.500,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp77.090.978,00. Sedangkan penganggaran untuk pengadaan kartu pemilih sebesar Rp66.302.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp76.077.000,00, dalam pengadaan kartu pemilih terjadi pelampauan anggaran yang kekurangannya diambilkan dari sisa anggaran biaya cetak surat suara.

Dalam pelaksanaan pengadaan surat suara dan kartu pemilih tersebut, diketahui terjadi kelebihan dalam pengadaan jika dibandingkan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Berdasarkan Keputusan KPUD Kabupaten Sumbawa Barat No.37/KEP/KPUD/Tahun 2005 tanggal 24 Juni 2005 diketahui bahwa jumlah DPT adalah 70.147 orang. Sesuai ketentuan pengadaan kartu pemilih yaitu DPT x 105%

dan surat suara yaitu $DPT \times 102,5\%$ dengan perhitungan jumlah pengadaan kartu pemilih sebanyak $70.147 \times 105\% = 73.654$ buah dan surat suara sebanyak $70.147 \times 102,5\% = 71.901$ buah, dengan demikian terjadi kelebihan sebagai berikut:

Uraian	Realisasi Pengadaan			Seharusnya 105% x DPT & 102,5% x DPT	Nilai Pemborosan (Rp)
	Jumlah (Rp)	H.Satuan (Rp)	Unit		
1	2	3	4	5	6 (4-5)*3
1. Kartu Pemilih	65.638.000,00	990	66.302	-	-
Tambahan	10.439.000,00	990	10.545	-	-
Jumlah 1	76.077.000,00	990	76.847	73.654	3.161.070,00
2. Surat Suara	73.310.930,00	1.045	70.154	-	-
Tambahan	3.657.500,00	1.045	3.500	-	-
Jumlah 2	76.968.430,00	1.045	73.654	71.901	1.831.885,00
Jumlah	153.045.430,00				4.992.955,00

Konfirmasi pada Kasubag Teknis dan Penyelenggara KPUD Kabupaten Sumbawa Barat menjelaskan bahwa perbedaan jumlah Daftar Pemilih Tetap dengan jumlah Kartu Pemilih tercetak sehubungan dengan singkatnya waktu, berdampak pada saat pembagian kartu pemilih dilapangan terjadi banyak kesalahan sehingga dilakukan percetakan kartu pemilih tambahan.

Sedangkan pencetakan surat suara dilakukan dengan menambah 5% dengan alasan, untuk masing-masing TPS diberikan surat suara tambahan 2,5% sesuai dengan Permendagri, dan 2,5% sisanya dialokasikan di KPUD sehubungan dengan kondisi geografis wilayah Kabupaten Sumbawa Barat berbukit-bukit, dengan alasan apabila terjadi kerusakan baik akibat hujan dan lain-lain pada saat dropping logistik maka cadangan yang ada di KPUD dapat dipergunakan.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Dalam Negeri No.12 tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Lampiran format RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) yang

menyatakan bahwa untuk cetak surat suara adalah $DPT \times 102,5\%$ dan Cetak Kartu Pemilih Tambahan sebesar 5% dari DPT atau seluruhnya $105\% \times DPT$.

- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.12 Tahun 2005 pada Pasal 34 ayat 3 menyatakan bahwa “penyediaan/penyesuaian anggaran Pilkada sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dilakukan dengan penghematan, pergeseran anggaran dan menggunakan belanja tidak tersangka sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.

Pengadaan kartu pemilih dan surat suara yang berlebih tersebut mengakibatkan pemborosan keuangan daerah sebesar Rp4.992.955,00.

Hal tersebut disebabkan kelalaian Panitia Pengadaan Barang pada KPUD Kabupaten Sumbawa Barat dalam mengadakan surat suara dan kartu pemilih melebihi jumlah yang diperkenankan.

Kepala Sub Bagian Teknis dan Penyelenggara KPUD Kabupaten Sumbawa Barat menjelaskan bahwa:

- a. Perbedaan jumlah Daftar Pemilih Tetap dengan jumlah Kartu Pemilih tercetak karena :
 - 1) Potensi Pemilih yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sangat singkat sekali bila dibandingkan dengan waktu jadwal penetapan pemilih, sehingga dari waktu yang singkat tersebut KPUD berkesimpulan dasar pembuatan Kartu Pemilih memakai potensi pemilih yang diberikan Pemda Kabupaten Sumbawa Barat.
 - 2) Setelah diumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan pembagian Kartu Pemilih di lapangan terjadi banyak kesalahan, dimana masih ada pemilih yang belum terdata, terdapat pemilih yang salah nama, tempat tinggal tidak jelas, jenis kelamin, tanggal lahir dan lain-lain, hal ini terjadi di Desa Maluk, Kecamatan Jereweh. Dari kesalahan diatas dilakukan percetakan Kartu Pemilih tambahan.

- b. Percetakan Surat Suara menurut ketentuan Permendagri No. 12 Tahun 2005 untuk Surat Suara Tambahan dibatasi 2,5% di tingkat Tempat Pemungutan Suara. KPUD Kabupaten Sumbawa Barat telah menambah 5% dengan alasan:
- 1) Untuk masing-masing TPS diberikan Surat Suara Tambahan 2,5% sesuai dengan Permendagri.
 - 2) Sedangkan 2,5% sisanya dialokasikan di KPUD dengan alasan kondisi geografis wilayah Kabupaten Sumbawa Barat berbukit-bukit, dengan alasan apabila terjadi kerusakan baik akibat hujan dan lain-lain pada saat droping logistik maka cadangan yang ada di KPUD dapat dipergunakan. Pada saat pelipatan Kartu Suara sekaligus dilakukan sortir terhadap hasil pencetakan Surat Suara dan apabila ditemui terjadi robek, salah cetak, salah warna cetak/melobor maka cadangan 2,5% di KPUD juga menjadi alasan penggunaan Surat Suara Cadangan di KPUD.

BPK RI menyarankan Bupati Sumbawa Barat agar memberi sanksi kepada Panitia Pengadaan Barang pada Sekretariat KPUD Kabupaten Sumbawa Barat atas kelalaiannya dalam mengadakan kartu pemilih dan surat suara melebihi jumlah yang diperkenankan.

2. Sisa Dana Pilkada Tahun 2005 sebesar Rp107.457.488,00 pada KPUD Kabupaten Sumbawa Barat belum disetor ke Kas Daerah

Berdasarkan realisasi Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Kabupaten Sumbawa Barat diketahui anggaran KPUD Kabupaten Sumbawa Barat sebesar Rp2.408.586.960,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.669.800.000,00. Realisasi penerimaan/pencairan uang dari Kas Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang diterima oleh KPUD Kabupaten Sumbawa Barat selama Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp1.769.807.950,00 sedangkan pengeluaran pada periode yang sama sebesar Rp1.669.800.580,00, sehingga terdapat sisa kas menurut laporan sebesar Rp100.007.370,00. Saldo tersebut sesuai juga dengan Buku Kas Umum Bendaharawan KPUD.

Sesuai hasil kas opname (tutup kas) pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2005 diketahui uang kas tunai yang ada di Bendahara KPUD Kabupaten Sumbawa Barat nihil. Sedangkan saldo buku bank No. Rek. 017.21.00008.02-6 atas nama Sekretaris KPU KSB/H.Ramli Ahmad di PT. Bank NTB Cabang Pembantu Taliwang sebesar Rp107.457.488,00. Dengan demikian terdapat selisih lebih sebesar Rp7.450.118,00 (Rp107.457.488,00 - Rp100.007.370,00), dengan perhitungan sebagai berikut:

Saldo/Sisa Buku sesuai BKU	Rp	100.007.370,00
Sisa Kas/Bank	Rp	107.457.488,00 (-)
Perbedaan positif	Rp	<u>7.450.118,00</u>
Perincian selisih:		
a) Jasa giro neto	Rp	7.550.038,00
b) Beban administrasi bank	Rp	(100.000,00)
c) Selisih lainnya	Rp	80,00 (+)
Jumlah perincian selisih	Rp	<u><u>7.450.118,00</u></u>

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2005 tanggal 16 Maret 2005 Pasal 29 menyebutkan bahwa "apabila sampai dengan berakhirnya kegiatan pelaksanaan Pilkada masih terdapat sisa dana APBD

pada Bendaharawan KPUD atau Bendahara Panwas wajib disetor sepenuhnya ke kas daerah”.

Sisa dana yang belum disetor ke dana daerah tersebut mengakibatkan tidak dapat segera dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat sebesar Rp107.457.488,00 dan membuka peluang untuk disalahgunakan.

Hal tersebut disebabkan kelalaian Bendahara dan Sekretaris KPUD Kabupaten Sumbawa Barat sebagai Atasan Langsung Bendahara tidak segera menyetor sisa dana Pilkada ke Kas Daerah.

Bendahara KPUD Kabupaten Sumbawa Barat menjelaskan bahwa sisa dana yang ada di rekening bank pada pembiayaan Pilkada Kabupaten Sumbawa Barat akan disetor bersamaan dengan penyampaian laporan pertanggung-jawaban kegiatan Pilkada.

BPK RI menyarankan Bupati Sumbawa Barat memberi sanksi kepada Bendahara dan Sekretaris KPUD Kabupaten Sumbawa Barat atas kelalaiannya dalam menyetorkan Sisa Dana Daerah belum mnyetorkan sisa dana Pilkada dan selanjutnya memerintahkan Bendahara dan Sekretaris KPUD Kabupaten Sumbawa Barat segera menyetor sisa dana Pilkada sebesar Rp107.457.488,00 ke Kas Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

3. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja Perjalanan Dinas pada KPUD dan PPK Kabupaten Sumbawa Barat sebesar Rp225.485.000,00 tidak didukung bukti yang memadai

Pemeriksaan terhadap Realisasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pilkada KPU Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2005 diketahui untuk Belanja Perjalanan Dinas KPU Kabupaten Sumbawa Barat dianggarkan sebesar Rp404.805.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp248.105.000,00 atau 61,29%.

Pemeriksaan lebih lanjut atas Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan bukti-bukti pendukung Belanja Perjalanan Dinas diketahui bahwa dari realisasi tersebut diantaranya sebesar Rp225.485.000,00 terdiri atas Sekretariat KPUD Kabupaten Sumbawa Barat sebesar Rp220.140.000,00, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Seteluk sebesar Rp2.625.000,00 dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Brang Rea sebesar Rp2.720.000,00 tidak didukung dengan bukti yang memadai dimana bukti perjalanan dinas (SPPD) tidak memuat kelengkapan dari pejabat yang memerintahkan perjalanan dinas, seperti: tanggal berangkat, tanggal kembali, dan tanda tangan pejabat. Demikian pula dalam bukti pendukung dari pejabat yang dikunjungi tidak memuat tanggal datang dan tanggal berangkat. Rincian secara lengkap dapat dilihat dalam *lampiran 5*.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan

- a. Permendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD dalam Pasal 57 ayat (1) menetapkan Pengguna Anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri bukti-bukti yang sah.
- b. Permendagri No. 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 20 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Bendahara KPUD dan Bendahara

Panwas berhak menolak pembayaran apabila tidak dilengkapi dengan bukti-bukti persyaratan yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.

Permasalahan tersebut di atas mengakibatkan pengeluaran sebesar Rp225.485.000,00 tidak dapat diyakini kebenarannya dan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan.

Hal tersebut disebabkan karena kelalaian:

- a. Bendahara KPUD dan PPK dalam menerima dan memverifikasi SPJ tidak mencermati keakuratan bukti-bukti perjalanan dinas.
- b. Atasan Langsung Bendahara dalam melakukan pengendalian/pengawasan terhadap SPJ perjalanan dinas.

Bendahara KPUD Kabupaten Sumbawa Barat menjelaskan bahwa tidak lengkapnya bukti Perjalanan Dinas disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap peraturan dari para pengguna anggaran yang melaksanakan perjalanan dinas yang memenuhi syarat pertanggungjawaban penggunaan dana Pilkada.

BPK RI menyarankan Bupati Sumbawa Barat agar memberi sanksi kepada:

- a. Bendahara KPUD dan PPK atas kelalaiannya dalam menerima dan memverifikasi SPJ tidak mencermati keakuratan bukti-bukti perjalanan dinas.
- b. Atasan Langsung Bendahara pada KPUD atas kelalaiannya dalam melakukan pengendalian/pengawasan terhadap SPJ perjalanan dinas.

4. PPh sebesar Rp5.240.835,00 kurang dan belum dipungut, serta PPh dan PPN sebesar Rp7.841.000,00 terlambat disetor ke Kas Negara

Pemeriksaan atas kewajiban pembayaran pajak-pajak kepada negara pada KPUD Kabupaten Sumbawa Barat atas kegiatan Pilkada Tahun 2005 diketahui terdapat PPh kurang dan belum dipungut sebesar Rp5.240.835,00, serta PPh dan PPN terlambat disetor sebesar Rp7.841.000,00 dengan rincian, sebagai berikut:

a. PPh kurang dipungut sebesar Rp4.090.835,00

Pekerjaan Audit Dana Kampanye untuk 5 (lima) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Barat yang dilaksanakan Kantor Akuntan Publik (KAP) "Salam Rauf & Rekan" Mataram dengan nilai kontrak sebesar Rp75.000.000,00. Fee jasa audit telah dibayarkan sesuai Kwitansi No. 498 tanggal 26 Juli 2005 sebesar Rp75.000.000,00. Atas pembayaran tersebut telah dipotong PPN dan PPh Pasal 22 sebesar Rp7.841.000,00, terdiri atas PPN sebesar Rp6.818.200,00 ($100/110 \times Rp75.000.000,00$) dan PPh Pasal 22 dengan tarif 1,5% atau sebesar $Rp1.022.800,00 = 1,5\% \times (Rp75.000.000,00 - Rp6.818.200,00)$. Atas pengadaan Jasa Audit tersebut seharusnya dikenakan PPh Pasal 23 dengan tarif efektif 7,5% atau sebesar $Rp1.022.800,00 = 1,5\% \times (Rp75.000.000,00 - Rp6.818.200,00)$, sehingga terjadi kekurangan pemungutan PPh sebesar $Rp4.090.835,00 = (Rp5.113.635,00 - Rp1.022.800,00)$.

b. PPh belum dipungut sebesar Rp1.150.000,00

Pembayaran honor Tim Verifikasi Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah belum dikenakan PPh Pasal 21, dengan rincian:

No	Penerima Honor	Jumlah Honor (Rp)	Tarif Pajak	Jumlah Pajak (Rp)
1)	Fud Syaifuddin, ST	3.500.000,00	5%	175.000,00
2)	Agus Irawan Syahmi, S.Pd.	3.250.000,00	5%	162.500,00
3)	Syahrul Mustofa, SH.	3.250.000,00	5%	162.500,00
4)	Udin Syafruddin, S.Ag.	3.250.000,00	5%	162.500,00
5)	Sahren W.W.*)	3.250.000,00	15%	487.500,00
	Jumlah	16.500.000,00		1.150.000,00

*Keterangan : *) Status PNS dikenakan pajak dengan tarif 15%*

Dengan demikian, jumlah pajak yang kurang dan belum dipungut seluruhnya sebesar Rp5.240.835,00 (Rp4.090.835,00 + Rp1.150.000,00).

c. PPh dan PPN terlambat disetor sebesar Rp7.841.000,00

Pajak atas Jasa Atas Jasa Audit yang telah dipungut pada tanggal 26 Juli 2005 sebagaimana disebutkan dalam huruf "a" sebesar Rp7.841.000,00 tersebut di atas, penyetoran pajaknya terlambat, yaitu baru dilakukan tanggal 12 Nopember 2005.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, atas penghasilan imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21, dipotong pajak sebesar 15% dari penghasilan neto.
- b. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-170/PJ./2002 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 jenis jasa lain dan perkiraan penghasilan neto PPh untuk jasa akuntansi dan pembukuan adalah 50% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN. Sehingga tarif yang efektifnya adalah $15\% \times 50\% \times \text{penghasilan bruto} = 7,5\%$.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pasal 24 (4) Bendahara KPUD dan Bendahara Panwas sebagai wajib pungut pajak menyetorkan seluruh hasil penerimaan pemotongan pajak ke rekening Kas Negara sesuai dengan perundang-undangan.

Hal tersebut mengakibatkan:

- a. PPh yang kurang/belum dipungut dan disetor ke kas negara mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp5.240.835,00.
- b. PPh dan PPN yang terlambat disetor ke kas negara sebesar Rp7.841.000,00 mengakibatkan tertundanya penerimaan negara dan membuka peluang terjadinya penyimpangan penggunaan uang tersebut.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh kelalaian Bendahara KPUD dan Para Penanggung Jawab Kegiatan Operasional Pilkada terhadap ketentuan perpajakan dalam mengenakan, memungut, dan menyetor kewajiban perpajakan secara benar dan tepat waktu.

Bendahara KPUD menjelaskan memang benar kurangnya pemahaman terhadap ketentuan perpajakan, karena kurangnya sosialisasi mengenai tata cara pemungutan pajak dari aparat perpajakan.

BPK RI menyarankan Bupati Sumbawa Barat memerintahkan Sekretaris KPUD Sumbawa Barat menarik pajak yang kurang dipungut sebesar Rp5.240.835,00 dan menyetor ke Kas Negara, serta memberi sanksi Bendahara KPUD atas keterlambatannya dalam memungut dan menyetor pajak sebesar Rp7.841.000,00.

5. Sisa barang persediaan pakai habis kegiatan Pilkada Tahun 2005 senilai Rp16.712.203,14 pada KPUD Kabupaten Sumbawa Barat belum diserahkan

Pemeriksaan atas barang-barang inventaris yang dimiliki KPUD Kabupaten Sumbawa Barat diketahui bahwa sisa barang persediaan pakai habis kegiatan Pilkada tahun 2005 seluruhnya senilai Rp16.712.203,14, oleh Bagian Pengurusan Barang, dalam hal ini Sub Bagian Umum sampai dengan saat pemeriksaan berakhir belum dilakukan serah terima barang ke Bagian Umum Sekda Kabupaten Sumbawa Barat. Adapun rincian sisa barang persediaan pakai habis kegiatan Pilkada pada *lampiran 6*.

Hasil konfirmasi dengan Kepala Sub Bagian Umum KPUD Kabupaten Sumbawa Barat dijelaskan bahwa Pihak KPUD telah menyiapkan Konsep Berita Acara Penyerahan Barang Inventaris dan Sisa Barang Persediaan Pakai Habis Kegiatan Pilkada Tahun 2005 kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, tapi pihak Sekretariat Daerah belum bersedia menandatangani Berita Acara tersebut sehingga persediaan barang tersebut masih tersimpan di gudang KPUD.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pasal 32 ayat (1) menyebutkan sisa barang persediaan Pilkada atau sarana dan prasarana lainnya yang digunakan untuk menunjang kegiatan Pilkada yang pengadaannya bersumber dari dana APBD diserahkan kembali oleh KPUD kepada Pemerintah Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan pelaksanaan Pilkada dengan dilengkapi berita acara serah terima.

Belum dilaksanakannya serah terima sisa barang persediaan pakai habis dalam kegiatan Pilkada Tahun 2005 tersebut mengakibatkan adanya peluang penyalahgunaan sisa barang pakai habis tersebut.

Hal tersebut disebabkan kelalaian Sekretaris KPUD Kabupaten Sumbawa Barat tidak segera menyerahkan sisa barang pakai habis kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Kepala Sub Bagian Umum Sekretariat KPUD Kabupaten Sumbawa Barat menjelaskan bahwa Sekretariat KPUD cq Kasubag Umum telah melakukan konsultasi sejak pelaksanaan Pilkada berakhir ke Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat cq Bagian Umum tentang pengembalian sisa barang namun Bagian Umum tidak mau bertanggung jawab atas hal itu dengan alasan yang bertanggung jawab adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). Kasubag Umum telah menemui pihak BPKD dan bersedia akan menerima penyerahan sisa barang tersebut.

BPK RI menyarankan Bupati Sumbawa Barat memberi sanksi Sekretaris KPUD Kabupaten Sumbawa Barat atas kelalaiannya tidak segera menyerahkan sisa barang persediaan pakai habis dalam kegiatan Pilkada dan selanjutnya memerintahkan agar segera menyetorkan sisa barang persediaan pakai habis kegiatan Pilkada Tahun 2005 senilai Rp16.712.203,14 dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

6. Pengeluaran untuk Pengadaan Kartu Pemilih sebesar Rp76.077.000,00 tidak dicatat dalam Buku Kas Umum dan tidak disajikan dalam laporan realisasi anggaran KPUD

Hasil pemeriksaan terhadap Buku Kas Umum Dana Operasional Pilkada Tahun Anggaran 2005 pada Bendahara KPUD Kabupaten Sumbawa Barat diketahui terjadi mutasi penerimaan sebesar Rp1.682.830.250,00 dan mutasi pengeluaran sebesar Rp1.582.822.880,00, sehingga terdapat saldo sebesar Rp100.007.370,00. Mutasi penerimaan terdiri dari penerimaan dari Kasda sebesar Rp1.638.635.450,00 dan penerimaan dari pemungutan pajak sebesar Rp44.194.800,00, dan mutasi pengeluaran sebesar Rp1.582.822.880,00 terdiri dari pengeluaran untuk belanja KPUD sebesar Rp1.538.628.080,00 dan pengeluaran untuk penyetoran pajak ke Kas Negara sebesar Rp44.194.800,00.

Bendahara KPUD menjelaskan terdapat pengeluaran yang atas beban anggaran dana operasional (DASK) Pilkada KPUD tidak dicatat dalam BKU, yaitu untuk pembayaran pengadaan Kartu Pemilih kepada pihak ketiga. Pemeriksaan lebih lanjut terhadap dokumen keuangan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sumbawa Barat diketahui bahwa terhadap pengadaan Kartu Pemilih dibayarkan langsung kepada rekanan dengan SPM Beban Tetap sebesar Rp76.077.000,00, dengan rincian:

- a. SPM No.1513/BT/2005 tanggal 12 Agustus 2005 sebesar Rp65.638.000,00.

Pembayaran untuk pengadaan Kartu Pemilih kepada CV. Panji Abadi sesuai SPK No. 027/06/SPK/SEK-KPU/2005 tanggal 31 Mei 2005 dengan Berita Acara Serah Terima Barang No. Bend.043/24/KPU/2005 tanggal 24 Juni 2005.

- b. SPM No.1610/BT/2005 tanggal 06 Sept. 2005 sebesar Rp10.439.000,00.

Pembayaran untuk pengadaan Kartu Pemilih Tambahan kepada CV. Panji Abadi sesuai SPK No. 010/SPK/SEK-KPU/2005 tanggal 18 Juni 2005 dengan Berita Acara Serah Terima Barang No. Bend.043/26/KPU/2005 tanggal 25 Juni 2005.

Atas transaksi yang dilaksanakan dengan SPM Beban Tetap sebesar Rp76.077.000,00 tersebut oleh Bendahara KPUD tidak dibukukan dalam Buku Kas Umum dan tidak disajikan dalam Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Belanja Pilkada Tahun 2005 pada KPUD Kabupaten Sumbawa Barat.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Permendagri No. 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pasal 19 ayat (3) menetapkan bahwa "Bendahara KPUD dan Bendahara Panwas wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran".

Permasalahan tersebut mengakibatkan realisasi anggaran untuk pengadaan Kartu Pemilih dalam kegiatan Pilkada Tahun 2005 pada KPUD Kabupaten Sumbawa Barat kurang disajikan sebesar Rp76.077.000,00.

Hal tersebut disebabkan oleh kelalaian Bendahara KPUD dan Atasan Langsungnya terhadap ketentuan yang mengatur pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan dana Pilkada.

Bendahara KPUD menjelaskan proses pencairan dana yang dilakukan melalui Beban Tetap (BT) langsung melalui Bendaharawan Umum Setda dan BPKD Kabupaten Sumbawa Barat. Semua administrasi keuangannya dibuat sendiri oleh rekanan, dalam hal ini Bendahara KPUD tidak tahu kapan SPM diterbitkan dan kapan pencairan dana dilakukan karena setelah pencairan dana tersebut rekanan tidak menyerahkan arsip SPM kepada Bendahara KPUD.

Bendahara KPUD juga pernah berkonsultasi dengan pihak BPKD apakah pencairan melalui BT juga harus dibukukan di KPUD, namun jawabnya tidak perlu karena sudah dibukukan di BPKD/Bendaharawan Setda.

BPK RI menyarankan Bupati Sumbawa Barat memberi sanksi kepada Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara pada KPUD Sumbawa Barat atas kelalaiannya dalam melakukan pembukuan dan menyusun laporan belanja Pilkada tidak sesuai ketentuan.

B. PANITIA PENGAWAS (PANWAS) PILKADA KABUPATEN SUMBAWA BARAT

1. Dana sebesar Rp9.000.000,00 pada Panitia Pengawas Kabupaten Sumbawa Barat belum dipertanggungjawabkan

Hasil pemeriksaan terhadap Buku Kas Umum pada mantan Bendahara Panwas Kabupaten Sumbawa Barat, diketahui bahwa terdapat saldo kas sebesar Rp9.000.060,00. Sesuai hasil kas opname (tutup kas) pada hari Senin tanggal 12 Desember 2005 diketahui uang kas tunai yang ada di Bendahara Panwas Kabupaten Sumbawa Barat nihil. Sedangkan saldo buku bank No. Rek. 017.21.00022.02-3 atas nama Ir. Ramli Serbini/Ketua Panwas di PT. Bank NTB Cabang Pembantu Taliwang sebesar Rp470.586,00. Dengan demikian terdapat selisih kurang sebesar Rp8.529.474,00 (Rp470.586,00 – Rp9.000.060,00), dengan perhitungan sebagai berikut:

Saldo/Sisa Buku sesuai BKU	Rp	9.000.060,00	
Sisa Kas/Bank	Rp	470.586,00	(-)
Perbedaan negatif		<u>Rp</u>	<u>(8.529.474,00)</u>
Perincian selisih:			
a. Jasa giro neto	Rp	20.586,00	
b. Beban administrasi bank	Rp	(50.000,00)	
c. Titipan uang pribadi*)	Rp	500.000,00	
d. Uang belum di SPJ-kan	Rp	(9.000.000,00)	
e. Selisih lainnya	Rp	(60,00)	(+)
Jumlah perincian selisih		<u>Rp</u>	<u>(8.529.474,00)</u>

*)Titipan uang pribadi dilakukan oleh mantan Ketua Panwas pada saat membuka rekening bank Panwas menggunakan dana pribadi sebesar Rp500.000,00.

Konfirmasi terhadap mantan Bendahara Panwas diketahui bahwa dana sebesar Rp9.000.000,00 telah dibayarkan kepada Agus Sudono, mantan Anggota Panwas sesuai bukti kwitansi tanggal 15 April 2005 untuk pembelian dua unit

komputer dan satu buah printer. Pembayaran tersebut dilakukan oleh mantan Bendahara Panwas atas persetujuan mantan Ketua Panwas yang juga menyetujui pembayaran sesuai bukti kwitansi tersebut. Di samping itu, pengadaan dua unit komputer dan satu buah printer tersebut tidak dianggarkan dalam DASK Panwas Tahun 2005, dan tidak memenuhi syarat administrasi karena bukti-bukti hanya berupa kwitansi kepada pihak yang akan mengadakan komputer, tanpa mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku.

Hasil pengecekan fisik pada Bagian Umum Setda Kabupaten Sumbawa Barat tanggal 12 Desember 2005, diketahui bahwa dua unit komputer dan satu unit printer dimaksud ada dan digunakan, namun status barang tersebut sebagai barang titipan dari Panwas Kabupaten Sumbawa Barat, karena belum dilengkapi dengan bukti pengadaan dan berita acara serah terima. Oleh karena itu, status barang tersebut belum dapat diakui sebagai milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, pasal 57 ayat (1) menetapkan bahwa "Pengguna Anggaran wajib mempertanggungjawabkan yang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah, ayat (2) SPJ berikut lampirannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya".
- b. Permendagri No. 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pasal 20 ayat (2) menetapkan bahwa "Bendahara KPUD dan Bendahara Panwas berhak menolak pembayaran apabila tidak dilengkapi dengan bukti-bukti persyaratan yang lengkap dan sah sesuai ketentuan perundang-undangan".

Pengeluaran uang yang tidak dianggarkan dalam anggaran Panwas tersebut mengakibatkan terjadinya peluang penyalahgunaan dana Pilkada sebesar Rp9.000.000,00.

Hal tersebut disebabkan oleh:

- a. Adanya kebijakan dari mantan Ketua Panwas Kabupaten Sumbawa Barat untuk segera memenuhi kebutuhan komputer dalam menunjang operasional Panwas, sehingga menyetujui pembayaran dana sebesar Rp9.000.000,00 kepada mantan Anggota Panwas namun tanpa dilengkapi bukti yang definitif.
- b. Kelalaian dari Agus Sudono, mantan Anggota Panwas Kabupaten Sumbawa Barat yang tidak segera menyampaikan surat pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut.
- c. Kelalaian mantan Bendahara Panwas Kabupaten Sumbawa Barat dalam melakukan pembayaran kepada pihak ketiga belum dilengkapi bukti yang memadai.

Bendahara Panwas menjelaskan bahwa pada awal keberadaan kantor Panwas belum memiliki komputer, sehingga harus meminjam komputer di SMPN 3 Taliwang. Setelah dana PK I keluar, Ketua Panwas langsung memerintahkan Sdr. Agus Sudono (Anggota Panwas) untuk melakukan pembelian komputer sebanyak 2 unit ke Mataram, dengan harga per unit sebesar Rp4.500.000,00 (termasuk PPN dan PPh). Bendahara Panwas telah menyiapkan semua administrasi yang berhubungan dengan pembelian 2 unit komputer tersebut untuk distempel rekanan tetapi Sdr. Agus Sudono tidak mau melaksanakannya.

BPK RI menyarankan Bupati Sumbawa Barat agar menegur mantan Bendahara Panwas, mantan Ketua Panwas, dan mantan Anggota Panwas An. Agus Sudono atas kelalaiannya dalam menggunakan anggaran Panwas yang tidak berdasarkan DASK Panwas Kabupaten Sumbawa Barat, dan selanjutnya segera melengkapi SPJ terhadap pengadaan komputer dan printer tersebut.

2. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja Perjalanan Dinas pada Panitia Pengawas Kabupaten Sumbawa Barat sebesar Rp15.550.000,00 tidak didukung bukti yang memadai

Pemeriksaan terhadap Realisasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pilkada Panitia Pengawas Kabupaten Sumbawa Barat, diketahui bahwa Belanja Perjalanan Dinas dianggarkan sebesar Rp149.760.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp81.080.000,00 atau 54,14%.

Pemeriksaan lebih lanjut atas Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan bukti-bukti pendukung Belanja Perjalanan Dinas diketahui bahwa dari realisasi sebesar Rp81.080.000,00 tersebut, diantaranya sebesar Rp15.550.000,00, tidak didukung dengan bukti yang memadai dimana bukti perjalanan dinas (SPPD) tidak memuat kelengkapan dari pejabat yang memerintahkan perjalanan dinas, seperti: tanggal berangkat, tanggal kembali, dan tanda tangan pejabat. Demikian pula dalam bukti pendukung dari pejabat yang dikunjungi tidak memuat tanggal datang dan tanggal berangkat. Rincian secara lengkap dapat dilihat dalam *lampiran 7*.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Permendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD dalam Pasal 57 ayat (1) menetapkan Pengguna Anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri bukti-bukti yang sah.
- b. Permendagri No. 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 20 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Bendahara KPUD dan Bendahara Panwas berhak menolak pembayaran apabila tidak dilengkapi

dengan bukti–bukti persyaratan yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.

Permasalahan tersebut mengakibatkan pengeluaran sebesar Rp15.550.000,00 tidak dapat diyakini kebenarannya dan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan.

Hal tersebut disebabkan karena kelalaian:

- a. Mantan Bendahara Panwas dalam menerima dan memverifikasi SPJ tidak mencermati keakuratan bukti-bukti perjalanan dinas.
- b. Atasan Langsung Bendahara yang tidak efektif dalam melakukan pengendalian/pengawasan terhadap SPJ perjalanan dinas.

BPK RI menyarankan Bupati Sumbawa Barat agar memberi sanksi kepada:

- a. Mantan Bendahara Panwas atas kelalaiannya dalam menerima dan memverifikasi SPJ tidak mencermati keakuratan bukti-bukti perjalanan dinas.
- b. Atasan Langsung Bendahara pada Panwas atas kelalaiannya yang tidak efektif dalam melakukan pengendalian/pengawasan terhadap SPJ perjalanan dinas.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Laporan Rekapitulasi Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Belanja Pilkada Tahun 2005 pada Kabupaten Sumbawa Barat
- Lampiran 2 : Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pilkada Tahun 2005 pada Kabupaten Sumbawa Barat
- Lampiran 3 : Laporan Realisasi Belanja Per Kegiatan Pilkada Tahun 2005 Kabupaten Sumbawa Barat
- Lampiran 4 : Laporan Realisasi Belanja Barang Dan Jasa Pilkada Tahun 2005 pada KPUD Kabupaten Sumbawa Barat
- Lampiran 5 : Daftar Bukti SPPD yang tidak memenuhi persyaratan pada KPUD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2005
- Lampiran 6 : Laporan Sisa Barang Persediaan Pakai Habis pada KPUD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2005
- Lampiran 7 : Daftar Bukti SPPD yang tidak memenuhi persyaratan pada Panwas Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2005

LAPORAN REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN DAN BELANJA PILKADA TAHUN 2005

A. KPUD KABUPATEN SUMBAWA BARAT

No.	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Jumlah Sisa Anggaran (Rp)
A.	PENERIMAAN	2.408.585.960	1.638.635.450	68,03%	#####
B.	BELANJA	2.408.585.960	1.538.628.080	63,88%	#####
	1. Belanja Pegawai	843.700.000	606.900.000	71,93%	#####
	1.1. Honorarium	655.150.000	536.550.000	81,90%	118.600.000
	1.2. Uang Lembur	188.550.000	70.350.000	37,31%	118.200.000
	2. Belanja Barang dan Jasa	320.410.900	207.229.280	64,68%	#####
	2.1. Barang Cetak / Penggandaan	217.706.900	121.931.000	56,01%	95.775.900
	2.2. Perlengkapan KPPS / TPS	54.524.000	49.441.280	90,68%	5.082.720
	2.3. Pengangkutan	19.380.000	17.040.000	87,93%	2.340.000
	2.4. Pemeliharaan Gedung Kantor / Inventaris	18.000.000	13.899.500	77,22%	4.100.500
	2.5. BBM	10.800.000	4.917.500	45,53%	5.882.500
	2.6. Alat Listrik dan Elektronik	-	-	-	-
	2.7. Biaya Peralatan Kebersihan	-	-	-	-
	3. Belanja Operasi	1.102.212.700	694.826.300	63,04%	#####
	3.1. Keperluan Perkantoran	404.960.000	234.996.800	58,03%	169.963.200
	- KPUD Kabupaten	171.000.000	112.926.800	66,04%	58.073.200
	- PPK	17.400.000	14.400.000	82,76%	3.000.000
	- KPPS	124.800.000	35.520.000	28,46%	89.280.000
	- PPS	91.760.000	72.150.000	78,63%	19.610.000
	3.2. Pembentukan KPPS, PPS dan PPK	11.305.000	8.557.500	75,70%	2.747.500
	3.3. Pengamanan Pencetakan, Penyimpanan dan Pendistribusian	35.400.000	17.480.000	49,38%	17.920.000
	3.4. Persiapan Pemungutan Suara	23.685.850	21.729.500	91,74%	1.956.350
	3.5. Penerangan/Penyuluhan/Sosialisasi	111.531.300	88.820.000	79,64%	22.711.300
	3.6. Raker/Pelatihan	39.325.000	23.612.500	60,04%	15.712.500
	3.7. Advokasi Hukum	20.000.000	15.000.000	75,00%	5.000.000
	3.8. Perjalanan Dinas	404.805.000	248.105.000	61,29%	156.700.000
	3.9. Pencalonan	29.000.550	29.000.000	100,00%	550
	3.10 Proses Perhitungan Suara	7.200.000	5.025.000	69,79%	2.175.000
	3.11 Audit & pengumuman dana kampanye	15.000.000	2.500.000	16,67%	12.500.000
	4. Kontijensi	142.262.360	29.672.500	20,86%	#####
C.	Sisa Sampai Tanggal Pelaporan	-	100.007.370		#####

B. PANWAS KABUPATEN SUMBAWA BARAT

No.	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Jumlah Sisa Anggaran (Rp)
A.	PENERIMAAN	#####	#####	79,44%	78.105.000
B.	BELANJA	#####	#####	77,07%	87.105.060
	1. Belanja Pegawai	#####	#####	100,00%	-
	1.1. Panwas Kabupaten	46.500.000,00	46.500.000,00	100,00%	-
	1.2. Sekretariat Panwas Kabupaten	6.300.000,00	6.300.000,00	100,00%	-
	1.3. Panwas Kecamatan	37.500.000,00	37.500.000,00	100,00%	-
	1.4. Sekretariat Panwas Kecamatan	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00%	-
	2. Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%	-
	2.1. Panwas Kabupaten	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%	-
	2.2. Panwas Kecamatan	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%	-
	3. BELANJA OPERASI	243.560.000,00	156.455.000,00	64,24%	87.105.000
	3.1 Keperluan Perkantoran	13.800.000,00	13.375.000,00	96,92%	425.000
	a. Panwas Kabupaten	6.300.000,00	5.875.000,00	93,25%	425.000
	b. Panwas Kecamatan	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00%	-
	3.2 Raker/Pelatihan	12.500.000,00	12.500.000,00	100,00%	-
	a. Biaya Pelaksanaan Raker	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00%	-
	b. Biaya Panitia	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%	-
	3.3 Kelompok Kerja	54.000.000,00	36.000.000,00	66,67%	18.000.000
	a. Pokja Penyelesaian Kasus di Kab	48.000.000,00	36.000.000,00	75,00%	12.000.000
	b. Pokja Penyelesaian Kasus di Kec	6.000.000,00	-	0,00%	6.000.000
	3.4 Sewa Gedung Kantor	13.500.000,00	13.500.000,00	100,00%	-
	a. Panwas Kabupaten	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%	-
	b. Panwas Kecamatan	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00%	-
	3.5 Perjalanan Dinas	149.760.000,00	81.080.000,00	54,14%	68.680.000
	a. Panwas Kabupaten	111.960.000,00	43.280.000,00	38,66%	68.680.000
	Konsultasi ke Propinsi	34.200.000,00	14.695.000,00	42,97%	19.505.000
	Inspeksi ke Kecamatan	77.760.000,00	28.585.000,00	36,76%	49.175.000
	b. Panwas Kecamatan	37.800.000,00	37.800.000,00	100,00%	-
	Konsultasi ke Kabupaten	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00%	-
	Inspeksi ke Desa	33.300.000,00	33.300.000,00	100,00%	-
	4. Belanja Kontijensi	24.956.000,00	24.955.940,00	100,00%	60
	Kontijensi	24.956.000,00	24.955.940,00	100,00%	60
C.	Sisa Sampai Tanggal Pelaporan		9.000.060,00		87.105.060

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS PILKADA TAHUN 2005

A. KPUD KABUPATEN SUMBAWA BARAT

a. Jumlah belanja Pilkada menurut DASK	Rp	2.408.585.960,00	
b. Jumlah penerimaan sampai saat pelaporan			
1) Jumlah Pengisian Kas (PK)	Rp	1.193.730.950,00	
2) Jumlah Beban Tetap (BT)	Rp	444.904.500,00	(+)
Jumlah			Rp 1.638.635.450,00
c. Jumlah pengeluaran sampai saat pelaporan			
1) Jumlah Pengisian Kas (PK)	Rp	1.093.723.580,00	
2) Jumlah Beban Tetap (BT)	Rp	444.904.500,00	
3) Panjar (UMK) ke pihak ketiga	Rp	-	(+)
Jumlah			Rp 1.538.628.080,00 (-)
d. Saldo/Sisa			Rp 100.007.370,00
e. Penerimaan, penyetoran jasa giro dan beban bank			
1) Penerimaan	Rp	-	
2) Penyetoran	Rp	-	
3) Beban administrasi bank	Rp	-	(+)
Saldo/Sisa			Rp -
f. Penerimaan dan penyetoran pajak			
1) Penerimaan PPN/PPh	Rp	44.194.800,00	
2) Penyetoran PPN/PPh	Rp	(44.194.800,00)	(+)
Saldo/Sisa			Rp - (-)
g. Saldo/Sisa Buku pada tanggal pelaporan sesuai BKU (d + e + f)			Rp 100.007.370,00
h. Sisa Kas/Bank (Uang Tunai dan Saldo Bank)			Rp 107.457.488,00 (-)
i. Perbedaan positif			Rp 7.450.118,00
j. Perincian selisih:			
1) Jasa giro neto belum dibukukan	Rp	7.550.038,00	
2) Beban administrasi bank belum dibukukan	Rp	(100.000,00)	
3) Selisih lain-lain	Rp	80,00	(+)
Jumlah perincian selisih			Rp 7.450.118,00

B. PANWAS KABUPATEN SUMBAWA BARAT

a. Jumlah belanja Pilkada menurut DASK		Rp	379.816.000,00
b. Jumlah penerimaan sampai saat pelaporan			
1) Jumlah Pengisian Kas (PK)	Rp	95.591.000,00	
2) Jumlah Beban Tetap (BT)	Rp	206.120.000,00 (+)	
Jumlah			Rp 301.711.000,00
c. Jumlah pengeluaran sampai saat pelaporan			
1) Jumlah Pengisian Kas (PK)	Rp	86.590.940,00	
2) Jumlah Beban Tetap (BT)	Rp	206.120.000,00	
3) Panjar (UMK) ke pihak ketiga	Rp	- (+)	
Jumlah			Rp 292.710.940,00 (-)
d. Saldo/Sisa			Rp 9.000.060,00
e. Penerimaan dan penyetoran bukan pajak (jasa giro & adm bank)			
1) Penerimaan	Rp	-	
2) Penyetoran	Rp	0	
3) Beban administrasi bank	Rp	- (-)	
Saldo/Sisa			Rp -
f. Penerimaan dan penyetoran pajak			
1) Penerimaan PPN/PPh	Rp	15.933.696,00	
2) Penyetoran PPN/PPh	Rp	15.933.696,00 (-)	
Saldo/Sisa			Rp - (+)
g. Saldo/Sisa Buku pada tanggal pelaporan (d + e + f)			Rp 9.000.060,00
h. Sisa Kas/Bank			Rp 470.586,00 (-)
i. Perbedaan (negatif)			Rp (8.529.474,00)
j. Perincian selisih:			
1) PPN/PPh yang belum disetor	Rp	-	
2) Jasa giro	Rp	29.414,00	
3) Kesulitan uang kecil	Rp	60,00	
4) Setoran uang pribadi untuk mengisi rekeni	Rp	(500.000,00)	
5) Uang muka belum di SPJ-kan	Rp	9.000.000,00 (+)	
Jumlah selisih			Rp 8.529.474,00

LAPORAN REALISASI BELANJA PER KEGIATAN PILKADA TAHUN 2005 KABUPATEN SUMBAWA BARAT

A. KPUD SUMBAWA BARAT

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi Pengeluaran	%	Jumlah Sisa Anggaran
I.	BELANJA PEGAWAI	Rp 843.700.000	Rp 606.900.000	71,93%	Rp 236.800.000
1.1.	Honorarium	Rp 655.150.000	Rp 536.550.000	81,90%	Rp 118.600.000
a.	KPUD	Rp 39.000.000	Rp 31.500.000	80,77%	Rp 7.500.000
1.	Ketua 1 Org x 6 bulan x Rp 1.500.000	Rp 9.000.000	Rp 9.000.000	100,00%	Rp -
2.	Anggota 4 Org x 6 bulan x Rp 1.250.000	Rp 30.000.000	Rp 22.500.000	75,00%	Rp 7.500.000
b.	Sekretariat KPUD	Rp 29.400.000	Rp 27.250.000	92,69%	Rp 2.150.000
1.	Sekretaris 1 Org x 6 bulan x Rp 500.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	100,00%	Rp -
2.	Ka Sub Bag 4 Org x 6 bulan x Rp 450.000	Rp 10.800.000	Rp 10.800.000	100,00%	Rp -
3.	Bendahara 1 Org x 6 bulan x Rp 250.000	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	100,00%	Rp -
4.	Pembantu Bendahara 0 Org x 0 bulan x Rp 200.000	Rp -	Rp -	0,00%	Rp -
5.	Pelaksana 8 Org x 6 bulan x Rp 200.000	Rp 9.600.000	Rp 9.600.000	100,00%	Rp -
6.	Tenaga Pendukung 5 Org x 6 bulan x Rp 150.000	Rp 4.500.000	Rp 2.350.000	52,22%	Rp 2.150.000
c.	PPK	Rp 54.000.000	Rp 54.000.000	100,00%	Rp -
1.	Ketua 5 Org x 6 bulan x Rp 400.000	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000	100,00%	Rp -
2.	Anggota 20 Org x 6 bulan x Rp 350.000	Rp 42.000.000	Rp 42.000.000	100,00%	Rp -
d.	Sekretariat PPK	Rp 21.750.000	Rp 20.250.000	93,10%	Rp 1.500.000
1.	Sekretaris 5 Org x 6 bulan x Rp 200.000	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	100,00%	Rp -
2.	Anggota 15 Org x 6 bulan x Rp 175.000	Rp 15.750.000	Rp 14.250.000	90,48%	Rp 1.500.000
e.	PPS	Rp 144.300.000	Rp 144.300.000	100,00%	Rp -
1.	Ketua 37 Org x 6 bulan x Rp 250.000	Rp 55.500.000	Rp 55.500.000	100,00%	Rp -
2.	Anggota 74 Org x 6 bulan x Rp 200.000	Rp 88.800.000	Rp 88.800.000	100,00%	Rp -
f.	Sekretariat PPS	Rp 111.000.000	Rp 74.000.000	66,67%	Rp 37.000.000
1.	Sekretaris 37 Org x 6 bulan x Rp 200.000	Rp 44.400.000	Rp 44.400.000	100,00%	Rp -
2.	Urusan Teknik Penyelenggara 37 Org x 6 bulan x Rp 150.000	Rp 33.300.000	Rp -	0,00%	Rp 33.300.000
3.	Urusan TU Keuangan 37 Org x 6 bulan x Rp 150.000	Rp 33.300.000	Rp 29.600.000	88,89%	Rp 3.700.000
e.	Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS)	Rp 235.700.000	Rp 185.250.000	78,60%	Rp 50.450.000
1.	Ketua 1 Org x 1 paket x Rp 150.000 x 248	Rp 37.200.000	Rp 29.250.000	78,63%	Rp 7.950.000
2.	Anggota 1489 ob x Rp 100.000	Rp 148.900.000	Rp 117.000.000	78,58%	Rp 31.900.000
3.	Linmas 2 Org x 1 paket x Rp 100.000 x 248	Rp 49.600.000	Rp 39.000.000	78,63%	Rp 10.600.000
f.	Kelompok Kerja KPU	Rp 20.000.000	Rp -	0,00%	Rp 20.000.000
1.	Pokja KPUD Kab/Kota 4 buah 4 Pokja x x Rp 5.000.000	Rp 20.000.000	Rp -	0,00%	Rp 20.000.000
1.2.	Uang Lembur (10 Hari)	Rp 188.550.000	Rp 70.350.000	37,31%	Rp 118.200.000
	KPU Kab/Kota 24 Org x 6 bulan x Rp 150.000	Rp 21.600.000	Rp 14.700.000	-	Rp 6.900.000
	Uang Lembur PPK 45 Org x 6 bulan x Rp 125.000	Rp 33.750.000	Rp 11.250.000	-	Rp 22.500.000
	Uang Lembur PPS 222 Org x 6 bulan x Rp 100.000	Rp 133.200.000	Rp 44.400.000	-	Rp 88.800.000

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi Pengeluaran	%	Jumlah Sisa Anggaran
II.	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp 320.410.900	Rp 207.229.280	64,68%	Rp 113.181.620
	2.1. Barang Cetak / Penggandaan	Rp 217.706.900	Rp 121.931.000	56,01%	Rp 95.775.900
	a. Cetak Surat Suara & peng. kertas 70.831 lbr x Rp 1.500	Rp 106.246.500	Rp 77.090.978	72,56%	Rp 29.155.522
	b. Penggandaan Formulir	Rp 18.658.400	Rp 18.505.022	99,18%	Rp 153.378
	- Form. A KWK 4.216 lbr x Rp 150	Rp 632.400	Rp 632.400	100,00%	Rp -
	- Form. B KWK 720 lbr x Rp 150	Rp 108.000	Rp 108.000	100,00%	Rp -
	- Form. C KWK 96.720 lbr x Rp 150,00	Rp 14.508.000	Rp 14.508.000	100,00%	Rp -
	- Lamp Model C2 KWK Besar 992 lbr x Rp 2.000,00	Rp 1.984.000	Rp 1.830.622	92,27%	Rp 153.378
	- Form. D KWK 4.144 lbr x Rp 150,00	Rp 621.600	Rp 621.600	100,00%	Rp -
	- Lamp Model D2 KWK Besar 296 lbr x Rp 2.000,00	Rp 592.000	Rp 592.000	100,00%	Rp -
	- Form. DA KWK 640 lbr x Rp 150,00	Rp 96.000	Rp 96.000	100,00%	Rp -
	- Lamp Model DA-1 KWK Besar 40 lbr x Rp 2.000,00	Rp 80.000	Rp 80.000	100,00%	Rp -
	- Form. DB KWK 136 lbr x Rp 150,00	Rp 20.400	Rp 20.400	100,00%	Rp -
	- Lamp Model DB-1 KWK Besar 8 lbr x Rp 2.000,00	Rp 16.000	Rp 16.000	100,00%	Rp -
	c. Penggandaan Juknis & Peraturan Perundangan	Rp 26.500.000	Rp 26.335.000	99,38%	Rp 165.000
	- Kabupaten 100 exp. x Rp 10.000	Rp 1.000.000	Rp 990.000	99,00%	Rp 10.000
	- PPK 125 exp. x Rp 10.000	Rp 1.250.000	Rp 1.237.500	99,00%	Rp 12.500
	- PPS 185 exp. x Rp 10.000	Rp 1.850.000	Rp 1.831.500	99,00%	Rp 18.500
	- KPPS / TPS 1.240 exp. x Rp 10.000	Rp 12.400.000	Rp 12.276.000	99,00%	Rp 124.000
	- Biaya Layout Desain Gambar 5 exp. x Rp 2.000.000	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	100,00%	Rp -
	d. Cetak Kartu Pemilih 63.145 x Rp 1.000	Rp 63.145.000	Rp -	0,00%	Rp 63.145.000
	e. Cetak Kartu Pemilih Tambahan 3.157 x Rp 1.000	Rp 3.157.000	Rp -	0,00%	Rp 3.157.000
	2.2. Perlengkapan KPPS / TPS	Rp 54.524.000	Rp 49.441.280	90,68%	Rp 5.082.720
	1 Bantalan dan Alat Pencoblos 248 buah x Rp 20.000	Rp 4.960.000	Rp 4.837.500	97,53%	Rp 122.500
	2 Sampul dan Segel 248 buah x Rp 24.000	Rp 5.952.000	Rp 6.000.000	100,81%	Rp (48.000)
	3 Tanda pengenalan,lem,tali,spidol,ballpoint 290 buah x Rp 70.000	Rp 20.300.000	Rp 19.293.780	95,04%	Rp 1.006.220
	4 Stiker Kotak Suara 992 buah x Rp 6.000	Rp 5.952.000	Rp 5.900.000	99,13%	Rp 52.000
	5 Pemasangan dan Pembongkaran 248 kpg x Rp 12.000	Rp 2.976.000	Rp 1.170.000	39,31%	Rp 1.806.000
	6 Gembok Kotak Suara 496 lbr x Rp 5.000	Rp 2.480.000	Rp 1.240.000	50,00%	Rp 1.240.000
	7 Tanda Khusus (Tinta Pilkada) 496 lbr x Rp 24.000	Rp 11.904.000	Rp 11.000.000	92,41%	Rp 904.000
	2.3. Pengangkutan	Rp 19.380.000	Rp 17.040.000	87,93%	Rp 2.340.000
	- Dari Kabupaten Ke Kec. (PPK) 5 KK x Rp 300.000	Rp 1.500.000	Rp 750.000	50,00%	Rp 750.000
	- Dari Kecamatan ke Desa/Kel. (PPS) 37 KK x Rp 120.000	Rp 4.440.000	Rp 4.440.000	100,00%	Rp -
	- Dari Desa/Kel. Ke KPPS (TPS) 248 KK x Rp 30.000	Rp 7.440.000	Rp 5.850.000	78,63%	Rp 1.590.000
	- Untuk Daerah sulit 4 Kec. 4 Kec x Rp 1.500.000	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	100,00%	Rp -
	2.4. Pemeliharaan	Rp 18.000.000	Rp 13.899.500	77,22%	Rp 4.100.500
	- Gedung Kantor / Inventaris 6 KB x Rp 1.200.000	Rp 7.200.000	Rp 3.800.000	52,78%	Rp 3.400.000
	- Kendaraan Roda 4 dan 2 6 KB x Rp 1.800.000	Rp 10.800.000	Rp 10.099.500	93,51%	Rp 700.500
	2.5. BBM	Rp 10.800.000	Rp 4.917.500	45,53%	Rp 5.882.500
	a. Roda 4 2 unit x 6 bulan x Rp 600.000	Rp 7.200.000	Rp 3.500.000	48,61%	Rp 3.700.000
	b. Roda 2 2 unit x 6 bulan x Rp 300.000	Rp 3.600.000	Rp 1.417.500	39,38%	Rp 2.182.500

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi Pengeluaran	%	Jumlah Sisa Anggaran	
III.	BELANJA OPERASI	Rp 1.102.212.700	Rp 694.826.300	63,04%	Rp 407.386.400	
	3.1. Keperluan Perkantoran	Rp 404.960.000	Rp 234.996.800	58,03%	Rp 169.963.200	
	KPU Kab/Kota	Rp 171.000.000	Rp 112.926.800	66,04%	Rp 58.073.200	
	a. Alat Tulis Kantor (ATK)	6 bulan x Rp 1.200.000	Rp 7.200.000	Rp 4.561.000	63,35%	Rp 2.639.000
	b. Listrik / Telepon /Air	6 bulan x Rp 1.800.000	Rp 10.800.000	Rp 1.765.800	16,35%	Rp 9.034.200
	c. Sidang / Rapat Biasa	6 bulan x Rp 3.000.000	Rp 18.000.000	Rp 2.800.000	15,56%	Rp 15.200.000
	d. Pengamanan Kantor	6 Org x 120 hari x Rp 30.000	Rp 21.600.000	Rp 16.200.000	75,00%	Rp 5.400.000
	e. Biaya Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa	5 paket x Rp 1.800.000	Rp 9.000.000	Rp 9.000.000	100,00%	Rp -
	f. Penyusunan Dokumentasi Hasil	6 KKB x Rp 1.800.000	Rp 10.800.000	Rp -	0,00%	Rp 10.800.000
	g. Dokumentasi / Publikasi	6 KKB x Rp 600.000	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000	100,00%	Rp -
	h. Akuntan Publik	5 paket x Rp 18.000.000	Rp 90.000.000	Rp 75.000.000	83,33%	Rp 15.000.000
	PPK	Rp 17.400.000	Rp 14.400.000	82,76%	Rp 3.000.000	
	a. Alat Tulis Kantor (ATK)	30 paket x Rp 100.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	100,00%	Rp -
	b. Listrik / Telepon /Air	30 paket x Rp 300.000	Rp 9.000.000	Rp 9.000.000	100,00%	Rp -
	c. Sidang / Rapat Biasa	30 paket x Rp 180.000	Rp 5.400.000	Rp 2.400.000	44,44%	Rp 3.000.000
	PPS	Rp 124.800.000	Rp 35.520.000	28,46%	Rp 89.280.000	
	a. Alat Tulis Kantor (ATK)	222 paket x Rp 60.000	Rp 13.320.000	Rp 13.320.000	100,00%	Rp -
	b. Listrik / Telepon /Air	248 paket x Rp 360.000	Rp 89.280.000	Rp -	0,00%	Rp 89.280.000
	c. Sidang / Rapat Biasa	222 paket x Rp 100.000	Rp 22.200.000	Rp 22.200.000	100,00%	Rp -
	KPPS	Rp 91.760.000	Rp 72.150.000	78,63%	Rp 19.610.000	
	a. Alat Tulis Kantor (ATK)	248 paket x Rp 80.000	Rp 19.840.000	Rp 15.600.000	78,63%	Rp 4.240.000
	b. Uang makan	2232 paket x Rp 10.000	Rp 22.320.000	Rp 17.550.000	78,63%	Rp 4.770.000
	c. Tenda, meja dan kursi	248 paket x Rp 200.000	Rp 49.600.000	Rp 39.000.000	78,63%	Rp 10.600.000
	3.2. Pembentukan PPK,PPS dan KPPS	Rp 11.305.000	Rp 8.557.500	75,70%	Rp 2.747.500	
	a. Administrasi Pembentukan	Rp 5.145.000	Rp 3.850.000	74,83%	Rp 1.295.000	
	PPK	5 PPK x Rp 100.000	Rp 500.000	Rp -	0,00%	Rp 500.000
	PPS	37 desa x Rp 25.000	Rp 925.000	Rp 925.000	100,00%	Rp -
	KPPS	248 TPS x Rp 15.000	Rp 3.720.000	Rp 2.925.000	78,63%	Rp 795.000
	b. Peresmian	Rp 6.160.000	Rp 4.707.500	76,42%	Rp 1.452.500	
	PPK	150 Org x Rp 3.500	Rp 525.000	Rp -	0,00%	Rp 525.000
	PPS	370 Org x Rp 3.500	Rp 1.295.000	Rp 1.295.000	100,00%	Rp -
	KPPS	1240 Org x Rp 3.500	Rp 4.340.000	Rp 3.412.500	78,63%	Rp 927.500
	3.3 Pengamanan Pencetakan, Penyimpanan dan Pendistribusian	70.800 PSS x Rp 500	Rp 35.400.000	Rp 17.480.000	49,38%	Rp 17.920.000
	3.4. Persiapan Pemungutan Suara	Rp 23.685.850	Rp 21.729.500	91,74%	Rp 1.956.350	
	a. Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) / Validasi	66.411 DPT x Rp 250	Rp 16.602.750	Rp 14.715.000	88,63%	Rp 1.887.750
	b. Sortir Surat Suara oleh PPK	70.831 x Rp 100	Rp 7.083.100	Rp 7.014.500	99,03%	Rp 68.600

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi Pengeluaran	%	Jumlah Sisa Anggaran
3.5.	Penerangan/Penyuluhan/Sosialisasi	Rp 111.531.300	Rp 88.820.000	79,64%	Rp 22.711.300
-	Penerangan dan Penyuluhan Sosialisasi media cetak & elektronik	65.371 DPT x Rp 300	Rp 1.000.000	5,10%	Rp 18.611.300
-	Biaya Koran	2 paket x Rp 10.000.000	Rp 20.000.000	100,00%	Rp -
-	Biaya Radio	2 paket x Rp 3.750.000	Rp 7.500.000	48,00%	Rp 3.900.000
-	Biaya Spanduk	125 bh x Rp 200.000	Rp 25.000.000	100,00%	Rp -
-	Biaya Pembuatan Poster Calon	750 bh x Rp 5.000	Rp 3.750.000	100,00%	Rp -
-	By Poster tata Cara Coblos dan Kampanye	1000 bh x Rp 2.500	Rp 2.500.000	100,00%	Rp -
-	Biaya Shooting Video	1 paket x Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	99,00%	Rp 50.000
-	Biaya Debat calon Kada dan Wakada	1 paket x Rp 28.170.000	Rp 28.020.000	99,47%	Rp 150.000
3.6.	Rapat Kerja / Pelatihan	Rp 39.325.000	Rp 23.612.500	60,04%	Rp 15.712.500
a.	Raker / Pelatihan	75 KK x Rp 125.000	Rp 9.375.000	80,51%	Rp 1.827.500
b.	Biaya Panitia	3 KK x Rp 1.200.000	Rp 3.600.000	47,64%	Rp 1.885.000
c.	Bimbingan Teknis Anggota KPU	4 OK x Rp 4.000.000	Rp 16.000.000	28,13%	Rp 11.500.000
d.	Rapat Kerja Teknis (TOT)	Rp 10.350.000	Rp 9.850.000	95,17%	Rp 500.000
-	Uang Saku	70 OB x Rp 10.000	Rp 700.000	100,00%	Rp -
-	Honor Penyaji	10 OB x Rp 200.000	Rp 2.000.000	100,00%	Rp -
-	Honor Moderator	10 OB x Rp 85.000	Rp 850.000	100,00%	Rp -
-	Biaya Panitia	1 OB x Rp 1.200.000	Rp 1.200.000	100,00%	Rp -
-	Alat Tulis Kantor (ATK)	1 OK x Rp 500.000	Rp 500.000	0,00%	Rp 500.000
-	Sewa Tempat	2 OK x Rp 300.000	Rp 600.000	100,00%	Rp -
-	Transportasi	70 OH x Rp 20.000	Rp 1.400.000	100,00%	Rp -
-	Snack Pembukaan & Penutupan	200 OH x Rp 5.000	Rp 1.000.000	100,00%	Rp -
-	Konsumsi+Snack Peserta+Panitia	140 OH x Rp 15.000	Rp 2.100.000	100,00%	Rp -
3.7.	Advokasi Hukum	1 paket x Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	75,00%	Rp 5.000.000
3.8.	Biaya Perjalanan Dinas KPU dan PPK	Rp 404.805.000	Rp 248.105.000	61,29%	Rp 156.700.000
3.9.	Pencalonan	Rp 29.000.550	Rp 29.000.000	100,00%	Rp 550
a.	Penelitian Keabsahan Pencalonan	11 Org x Rp 1.500.000	Rp 16.500.000	100,00%	Rp -
b.	Pemerik. Kesehatan Pasangan Calon	1 Paket x Rp 7.500.000	Rp 7.500.000	100,00%	Rp -
c.	Peng. Pasangan Calon Resmi	370 Paket x Rp 13.515	Rp 5.000.550	99,99%	Rp 550
3.10.	Proses Perhitungan Suara	Rp 7.200.000	Rp 5.025.000	69,79%	Rp 2.175.000
a.	Pelatihan Operator Komputer	25 OB x Rp 120.000	Rp 3.000.000	77,50%	Rp 675.000
b.	Operator Komputer	20 OB x Rp 60.000	Rp 1.200.000	100,00%	Rp -
c.	Rapat Pleno Penghitungan Suara	1 paket x Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	50,00%	Rp 1.500.000
3.11.	Audit & Peng. Dana Kampanye	5 x Rp 3.000.000	Rp 2.500.000	16,67%	Rp 12.500.000
IV	BELANJA KONTIJENSI				
4.1	Kontijensi 10% dari Belanja Barang dan Operasi	Rp 142.262.360	Rp 29.672.500	20,86%	Rp 112.589.860
Jumlah Seluruhnya		Rp 2.408.585.960	Rp 1.538.628.080	63,88%	Rp 869.957.880

B. PANWAS KABUPATEN SUMBAWA BARAT

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi Pengeluaran	%	Jumlah Sisa Anggaran
1	2	3	4	5 (4/3)%	6 (3-4)
I.	BELANJA PEGAWAI	Rp 105.300.000	Rp 105.300.000	100,00%	Rp -
	1.1. Honorarium	Rp 105.300.000	Rp 105.300.000	100,00%	Rp -
	a. Panitia Pengawas Kabupaten	Rp 46.500.000	Rp 46.500.000	100,00%	Rp -
	1. Ketua 1 Org x 6 bulan x Rp 1.750.000	Rp 10.500.000	Rp 10.500.000	100,00%	Rp -
	2. Anggota 4 Org x 6 bulan x Rp 1.500.000	Rp 36.000.000	Rp 36.000.000	100,00%	Rp -
	b. Sekretariat Panitia Pengawas Kab	Rp 6.300.000	Rp 6.300.000	100,00%	Rp -
	1. Urusan Keuangan 1 Org x 6 bulan x Rp 250.000	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	100,00%	Rp -
	2. Staf Pendukung 4 Org x 6 bulan x Rp 200.000	Rp 4.800.000	Rp 4.800.000	100,00%	Rp -
	c. Panitia Pengawas Kecamatan	Rp 37.500.000	Rp 37.500.000	100,00%	Rp -
	1. Urusan Keuangan 5 Org x 6 bulan x Rp 450.000	Rp 13.500.000	Rp 13.500.000	100,00%	Rp -
	2. Staf Pendukung 10 Org x 6 bulan x Rp 400.000	Rp 24.000.000	Rp 24.000.000	100,00%	Rp -
	d. Sekretariat Panwas Kecamatan	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	100,00%	Rp -
	1. Urusan Keuangan 5 Org x 6 bulan x Rp 200.000	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	100,00%	Rp -
	2. Staf Pendukung 10 Org x 6 bulan x Rp 150.000	Rp 9.000.000	Rp 9.000.000	100,00%	Rp -
II.	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	100,00%	Rp -
	2.1. Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	100,00%	Rp -
	a. Panwas Kabupaten	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	100,00%	Rp -
	Biaya Cetak dan Penggandaan 6 bulan x Rp 500.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	100,00%	Rp -
	b. Panwas Kecamatan	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	100,00%	Rp -
	Biaya Cetak dan Penggandaan 15 Kec x Rp 200.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	100,00%	Rp -

1	2				3	4	5 (4/3)%	6 (3-4)
III.	BELANJA OPERASI				Rp 243.560.000	Rp 156.455.000	64,24%	Rp 87.105.000
	3.1 Keperluan Perkantoran				Rp 13.800.000	Rp 13.375.000	96,92%	Rp 425.000
	a. Panwas Kabupaten				Rp 6.300.000	Rp 5.875.000	93,25%	Rp 425.000
	ATK	6 bulan	x Rp	750.000	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000	100,00%	Rp -
	Sidang/Rapat Koordinasi	6 bulan	x Rp	300.000	Rp 1.800.000	Rp 1.375.000	76,39%	Rp 425.000
	b. Panwas Kecamatan				Rp 7.500.000	Rp 7.500.000	100,00%	Rp -
	ATK	15 Kec	x Rp	300.000	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000	100,00%	Rp -
	Sidang/Rapat Koordinasi	15 Kec	x Rp	200.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	100,00%	Rp -
	3.2 Raker/Pelatihan				Rp 12.500.000	Rp 12.500.000	100,00%	Rp -
	a. Biaya Pelaksanaan Raker	15 Kec	x Rp	500.000	Rp 7.500.000	Rp 7.500.000	100,00%	Rp -
	b. Biaya Panitia	1 Paket	x Rp	5.000.000	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	100,00%	Rp -
	3.3 Kelompok Kerja				Rp 54.000.000	Rp 36.000.000	66,67%	Rp 18.000.000
	a. Pokja Penyelesaian Kasus di Kab	240 ob	x Rp	200.000	Rp 48.000.000	Rp 36.000.000	75,00%	Rp 12.000.000
	b. Pokja Penyelesaian Kasus di Kec	60 ob	x Rp	100.000	Rp 6.000.000	Rp -	0,00%	Rp 6.000.000
	3.4 Sewa Gedung Kantor				Rp 13.500.000	Rp 13.500.000	100,00%	Rp -
	a. Panwas Kabupaten	6 bl	x Rp	1.000.000	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	100,00%	Rp -
	b. Panwas Kecamatan	15 Kec	x Rp	500.000	Rp 7.500.000	Rp 7.500.000	100,00%	Rp -
	3.5 Perjalanan Dinas				Rp 149.760.000	Rp 81.080.000	54,14%	Rp 68.680.000
	a. Panwas Kabupaten				Rp 111.960.000	Rp 43.280.000	38,66%	Rp 68.680.000
	Konsultasi ke Propinsi	36 ok	x Rp	950.000	Rp 34.200.000	Rp 14.695.000	42,97%	Rp 19.505.000
	Inspeksi ke Kecamatan	432 ob	x Rp	180.000	Rp 77.760.000	Rp 28.585.000	36,76%	Rp 49.175.000
	b. Panwas Kecamatan				Rp 37.800.000	Rp 37.800.000	100,00%	Rp -
	Konsultasi ke Kabupaten	30 ok	x Rp	150.000	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000	100,00%	Rp -
	Inspeksi ke Desa	222 od	x Rp	150.000	Rp 33.300.000	Rp 33.300.000	100,00%	Rp -
	Total Belanja Barang & Jasa dan Belanja Operasi				Rp 249.560.000	Rp 162.455.000	65,10%	Rp 87.105.000
IV	BELANJA KONTIJENSI							
	Kontijensi	10%	x Rp	249.560.000	Rp 24.956.000	Rp 24.955.940	100,00%	Rp 60
Jumlah Seluruhnya					Rp 379.816.000	Rp 292.710.940	77,07%	Rp 87.105.060

**LAPORAN REALISASI BELANJA BARANG DAN JASA PILKADA
PADA KPUD KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2005**

No.	Jenis Barang	Satuan	Tgl/No Kwitansi, SPK, Kontrak	Jumlah Pengadaan		Jumlah (Rp)	Pengguna Barang
				Unit	H.Satuan		
1	2	3	4	5	6	7=5X6	8
1	Cetakan & Penggandaan		31/05/2005				
	Surat Suara	lbr	027/01/SPK/Sek-KPU/2005	70.154,00	1.045,00	73.310.930,00	KPUD
	Form A KWK	lbr	CV, DINAMIKA	4.216,00	159,91	674.167,91	KPUD
	Form B KWK	lbr		720,00	159,91	115.133,04	KPUD
	Form C KWK	lbr		96.720,00	159,91	15.466.205,04	KPUD
	Lam. Model C KWK B	lbr		992,00	1.210,00	1.200.320,00	KPUD
	Formulir D KWK	lbr		4.144,00	159,91	662.654,61	KPUD
	Lam. Model D2 KWK B	lbr		296,00	1.210,00	358.160,00	KPUD
	Formulir DA KWK	lbr		640,00	159,91	102.340,48	KPUD
	Model DA 1 KWK Besar	lbr		40,00	1.210,00	48.400,00	KPUD
	Formulir DB KWK	lbr		136,00	159,91	21.747,35	KPUD
	Model DB 1 KWK Besar	lbr		8,00	1.210,00	9.680,00	KPUD
2	Pengadaan		31/05/2005				
	Sampul dan Segel	lbr	SPK/027/05/SPK/Sek-KPU/2005	248,00	22.000,00	5.456.000,00	KPUD
	Stiker kotak suara	lbr	CV, DINAMIKA	992,00	5.410,00	5.366.720,00	KPUD
3	Pengadaan Juknis &		31/05/2005				
	Buku Peraturan		SPK/027/07/SPK/Sek-KPU/2005				
	- Kabupaten	bh	UD. PARAHYANGAN	100,00	9.900,00	990.000,00	KPUD
	- PPK	bh		125,00	9.900,00	1.237.500,00	KPUD
	-PPS	bh		185,00	9.900,00	1.831.500,00	KPUD
	-KPPS / TPS	bh		1.240,00	9.900,00	12.276.000,00	KPUD
4	Layout Disain Gambar	lbr	31/05/2005				
	Layout/Disain Cover	lbr	SPK/027/08/SPK/Sek-KPU/2005	500,00	9.191,00	4.595.500,00	KPUD
	Layout/ disain Tata Letak Gambar	lbr	UD. PRAHYANGAN	500,00	9.191,00	4.595.500,00	KPUD
5	Perlengkapan KPPS	bt	31/05/2005	496,00	22.177,42	11.000.000,00	KPUD
	TPS Tanda Khusus (Tinta Pilkada)		SPK/027/03/SPK/Sek-KPU/2005 UD. SUARA NUSA NIAGA. N				
6	Penerangan penyuluhan sosialisasi via spanduk	lbr	31/05/2005	125,00	200.000,00	25.000.000,00	KPUD
			027/02/SPK/Sek-SPK/2005 UD. AKBAR PRATAMA				
7	Tanda Pengenal		31/05/2005				
	PPK	bh	SPK/04/SPK/Sek-KPU/2005	25,00	3.409,20	85.230,00	KPUD
	PPS/KPPS	bh	UD. AKBAR PRATAMA	111,00	3.409,20	378.421,20	KPUD
	Keamanan	bh		496,00	3.409,20	1.690.963,20	KPUD
	Panitia	bh		1.736,00	3.409,20	5.918.371,20	KPUD
	Saksi	bh		1.240,00	3.409,20	4.227.408,00	KPUD
8	Penc & penggandaan	bh	31/05/2005	66.302,00	990,00	65.638.980,00	KPUD
	Kartu Pemilih		SPK/027/06/SPK/Sek-KPU/2005				
	Cetak Kartu Pemilih	bh	25/06/2005	10.545,00	990,00	10.439.550,00	KPUD
9	Bolpoin	bh	13/06/2005	580,00	3.000,00	1.740.000,00	KPUD
	Gembok	bh	PAN.II/11/KPU/2005	248,00	5.000,00	1.240.000,00	KPUD
			UD.ALFIN				
10	Foto Copy	lbr	19/06/2005	19.961,00	-	3.331.100,00	KPUD
	Penjilidan	exp	PAN.II/11/KPU/2005	534,00			
			UD.ALFIN				
11	Foto Copy	lbr	14/06/2005	25.815,00		3.956.500,00	KPUD
	Penjilidan	exp	PAN.II/11/KPU/2005	550,00			
			UD.ALFIN				

1	2	3	4	5	6	7=5X6	8
12	Lem Kertas	bh	13/06/2005	580,00	4.000,00	2.320.000,00	KPUD
	Tali / Gelang	kg	PAN.II/11/KPU/2005	5,00	25.000,00	125.000,00	KPUD
	Spidol	bh	UD.FANTASI	580,00	2.291,00	1.328.780,00	KPUD
	Tas Plastik	pcs		10,00	25.000,00	250.000,00	KPUD
13	Bantalan	bh	13/06/2005	744,00	6.250,00	4.650.000,00	KPUD
	Alat Pencoblos	kg	PAN.II/11/KPU/2005	15,00	12.500,00	187.500,00	KPUD
14	Penyediaan	unit	15/06/2005	1,00		1.820.000,00	KPUD
	Acara Debat Kandidat		PAN.II/11/KPU/2005				
			CV. PINAS				
15	Pembelian ATK DPS/DPT	paket	06/06/2005	1,00	3.962.500,00	3.962.500,00	OPT/DPS
			PAN.II/26/KPU/2005				
			CV. PANJI ABDI				
16	Poster Tata Cara Coblos dan Kampanye	bh	02/06/2005	1.000,00	2.500,00	2.500.000,00	KPUD
			PAN.II/29/KPU/2005				
			UD. DINAMIKA				
17	Biaya Pembuatan stiker	lbr	02/06/2005	1.600,00	1.250,00	2.000.000,00	KPUD
			PAN.II/33/KPU/2005				
18	Pembuatan poster Calon	bh	02/06/2005	750,00	5.000,00	3.750.000,00	KPUD
			PAN.II/34/KPU/2005				
			UD. DINAMIKA				
19	Foto Copy	lbr	30/06/2005	11.070,00	100,00	1.107.000,00	KPUD
	Penjilitan	exp	PAN.II/36/KPU/2005	48,00	2.500,00	120.000,00	KPUD
20	Cetak Surat Sisa Tamb.	lbr	25/06/2005	3.500,00	1.045,00	3.657.500,00	KPUD
			PAN.II/27/Sek-KPU/2005				
			UD.DINAMIKA				
21	Penggandaan Tabel Copy	lbr	24/06/2005	46.800,00	100,00	4.680.000,00	KPUD
			PAN.II/28/Sek-KPU/2005				
	Jumlah					295.423.262,03	

**DAFTAR BUKTI SPPD YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN
PADA KPUD KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

Tanggal	Waktu	Tujuan	Atas Nama	Jumlah
1	2	3	4	5
A. Sekretariat KPUD				
Februari				
03-Jan-05	4 s.d. 10 Jan 2005	Jakarta	Fud Syaifuddin,ST	4.730.000,00
03-Jan-05	4 s.d. 10 Jan 2005	Jakarta	Sahren AW	4.380.000,00
20-Jan-05	24 s.d. 28 Jan 2005	Mataram	Fud Syaifuddin,ST	950.000,00
20-Jan-05	24 s.d. 28 Jan 2005	Mataram	Sahren AW	825.000,00
26-Jan-05	27 Jan s.d. 2 Feb 2005	Mataram	H. Ramli Ahmad	825.000,00
26-Jan-05	29 Jan s.d. 4 Feb 2005	Jakarta	Sahren AW	4.380.000,00
12-Feb-05	13 s.d 17 Feb 2005	Mataram	Fud Syaifuddin,ST	950.000,00
14-Feb-05	14 s.d. 16 Feb 2005	Dalam Daerah	Fud Syaifuddin,ST	180.000,00
14-Feb-05	14 s.d. 16 Feb 2005	Dalam Daerah	H. Ramli Ahmad	180.000,00
14-Feb-05	14 s.d. 16 Feb 2005	Dalam Daerah	Syahrul Mustafa,SH	180.000,00
14-Feb-05	14 s.d. 16 Feb 2005	Dalam Daerah	Agus Irawan	180.000,00
17-Feb-05	17 s.d. 19 Feb 2005	Dalam Daerah	Drs. M.Buchori	150.000,00
17-Feb-05	17 s.d. 19 Feb 2005	Dalam Daerah	Arifin,BSc	150.000,00
17-Feb-05	17 s.d. 19 Feb 2005	Dalam Daerah	Sahren AW	150.000,00
17-Feb-05	17 s.d. 19 Feb 2005	Dalam Daerah	Suraiyah	150.000,00
17-Feb-05	17 s.d. 19 Feb 2005	Dalam Daerah	Harjito	135.000,00
21-Feb-05	21 s.d 25 Feb 2005	Mataram	H. Ramli Ahmad	950.000,00
21-Feb-05	21 s.d 25 Feb 2005	Mataram	Fud Syaifuddin,ST	950.000,00
21-Feb-05	21 s.d 25 Feb 2005	Mataram	Agus Irawan	950.000,00
21-Feb-05	21 s.d 25 Feb 2005	Mataram	Udin Syafrudin	950.000,00
21-Feb-05	21 s.d 25 Feb 2005	Mataram	Syahrul Mustafa,SH	950.000,00
				23.245.000,00
Maret				
28-Feb-05	1 s.d. 7 Mar 2005	Jakarta	Fud Syaifuddin,ST	4.730.000,00
28-Feb-05	1 s.d. 7 Mar 2005	Jakarta	Agus Irawan	4.730.000,00
28-Feb-05	1 s.d. 7 Mar 2005	Jakarta	Udin Syafrudin	4.730.000,00
28-Feb-05	1 s.d. 7 Mar 2005	Jakarta	Syahrul Mustafa,SH	4.730.000,00
05-Mar-05	28 s.d. 4 Mar 2005	Mataram	H. Ramli Ahmad	950.000,00
05-Mar-05	5 s.d. 9 Mar 2005	Mataram	Sahren AW	825.000,00
05-Mar-05	5 s.d. 9 Mar 2005	Mataram	Suraiyah	825.000,00
05-Mar-05	5 s.d. 9 Mar 2005	Mataram	Agus Irawan	950.000,00
09-Mar-05	9 s.d. 11 Mar 2005	Dalam Daerah	Syahrul Mustafa,SH	180.000,00
10-Mar-05	10 s.d. 12 Mar 2005	Dalam Daerah	H. Ramli Ahmad	440.000,00
10-Mar-05	10 s.d. 12 Mar 2005	Dalam Daerah	Harjito	135.000,00
15-Mar-05	16 s.d. 18 Mar 2005	Dalam Daerah	H. Ramli Ahmad	180.000,00
15-Mar-05	16 s.d. 18 Mar 2005	Dalam Daerah	Fud Syaifuddin,ST	180.000,00
15-Mar-05	16 s.d. 18 Mar 2005	Dalam Daerah	Udin Syafrudin	180.000,00
15-Mar-05	16 s.d. 18 Mar 2005	Dalam Daerah	Syahrul Mustafa,SH	180.000,00
19-Mar-05	19 s.d. 25 Mar 2005	Jakarta	H. Ramli Ahmad	4.730.000,00
19-Mar-05	19 s.d. 25 Mar 2005	Jakarta	Arifin,BSc	4.380.000,00
28-Mar-05	28 Mar s.d. 1 April 2005	Mataram	Udin Syafrudin	950.000,00
28-Mar-05	28 Mar s.d. 1 April 2005	Dalam Daerah	Agus Irawan	180.000,00
28-Mar-05	28 Mar s.d. 1 April 2005	Dalam Daerah	Arifin,BSc	150.000,00
28-Mar-05	28 Mar s.d. 1 April 2005	Dalam Daerah	Suraiyah	150.000,00
28-Mar-05	28 Mar s.d. 1 April 2005	Dalam Daerah	Harjito	135.000,00
				34.620.000,00
Anril				

1	2	3	4	5
09-Apr-05	9 s.d. 11 April 2005	Dalam Daerah	Sahren AW	180.000,00
12-Apr-05	12 s.d. 16 April 2005	Mataram	Suraiyah	825.000,00
11-Apr-05	12 s.d. 16 April 2005	Mataram	Harjito	700.000,00
12-Apr-05	12 s.d.18 April 2005	Jakarta	Fud Syaifuddin,ST	4.730.000,00
12-Apr-05	12 s.d.18 April 2005	Jakarta	Agus Irawan	4.730.000,00
12-Apr-05	12 s.d.18 April 2005	Jakarta	Udin Syafrudin	4.730.000,00
12-Apr-05	12 s.d.18 April 2005	Jakarta	Syahrul Mustafa,SH	4.730.000,00
				21.525.000,00
Mei				
16-Mei-05	16 s.d. 22 Mei 2005	Denpasar	Burhanuddin Jebang,SH	2.850.000,00
27-Apr-05	27 April s.d. 1 Mei 2005	Mataram	Arifin,BSc	825.000,00
27-Apr-05	27 April s.d. 1 Mei 2005	Mataram	Suraiyah	825.000,00
13-Apr-05	13 s.d. 15 April 2005	Dalam Daerah	H.Ramli Ahmad	180.000,00
13-Apr-05	13 s.d. 15 April 2005	Dalam Daerah	Nuryati	150.000,00
13-Apr-05	13 s.d. 15 April 2005	Dalam Daerah	Sahren	150.000,00
13-Apr-05	13 s.d. 15 April 2005	Dalam Daerah	Syaifullah	135.000,00
09-Mei-05	9 s.d. 15 Mei 2005	Jakarta	Suraiyah	4.380.000,00
				9.495.000,00
Juni				
11-Jun-05	11 s.d. 13 Juni 2005	Dalam Daerah	Fud Syaifuddin,ST	180.000,00
11-Jun-05	11 s.d. 13 Juni 2005	Dalam Daerah	Harjito	135.000,00
11-Jun-05	11 s.d. 13 Juni 2005	Dalam Daerah	Agus Irawan	180.000,00
11-Jun-05	11 s.d. 13 Juni 2005	Dalam Daerah	Arifin	150.000,00
11-Jun-05	11 s.d. 13 Juni 2005	Dalam Daerah	Udin Syafruddin	180.000,00
11-Jun-05	11 s.d. 13 Juni 2005	Dalam Daerah	Syaifullah	135.000,00
11-Jun-05	11 s.d. 13 Juni 2005	Dalam Daerah	Syahrul Mustafa	180.000,00
11-Jun-05	11 s.d. 13 Juni 2005	Dalam Daerah	Sahren AW	150.000,00
11-Jun-05	11 s.d. 13 Juni 2005	Dalam Daerah	Suraiyah	150.000,00
11-Jun-05	11 s.d. 13 Juni 2005	Dalam Daerah	Ahyar	135.000,00
11-Jun-05	11 s.d. 13 Juni 2005	Dalam Daerah	Burhanuddin Jebang,SH	150.000,00
11-Jun-05	11 s.d. 13 Juni 2005	Dalam Daerah	Aan Hidayat	135.000,00
13-Jun-05	13 s.d. 19 Juni 2005	Jakarta	M.Buchari	4.380.000,00
14-Jun-05	14 s.d. 16 Juni 2005	Dalam Daerah	Fud Syaifuddin,ST	180.000,00
14-Jun-05	14 s.d. 16 Juni 2005	Dalam Daerah	Harjito	135.000,00
14-Jun-05	14 s.d. 16 Juni 2005	Dalam Daerah	Agus Irawan	180.000,00
14-Jun-05	14 s.d. 16 Juni 2005	Dalam Daerah	Arifin	150.000,00
14-Jun-05	14 s.d. 16 Juni 2005	Dalam Daerah	Udin Syafruddin	180.000,00
14-Jun-05	14 s.d. 16 Juni 2005	Dalam Daerah	Syaifullah	135.000,00
14-Jun-05	14 s.d. 16 Juni 2005	Dalam Daerah	Syahrul Mustafa	180.000,00
14-Jun-05	14 s.d. 16 Juni 2005	Dalam Daerah	Sahren AW	150.000,00
14-Jun-05	14 s.d. 16 Juni 2005	Dalam Daerah	Suraiyah	150.000,00
14-Jun-05	14 s.d. 16 Juni 2005	Dalam Daerah	Ahyar	135.000,00
14-Jun-05	14 s.d. 16 Juni 2005	Dalam Daerah	Aan Hidayat	135.000,00
14-Jun-05	14 s.d. 16 Juni 2005	Dalam Daerah	Burhanuddin Jebang,SH	150.000,00
17-Jun-05	17 s.d. 19 Juni 2005	Dalam Daerah	Fud Syaifuddin,ST	180.000,00
17-Jun-05	17 s.d. 19 Juni 2005	Dalam Daerah	Arifin	150.000,00
17-Jun-05	17 s.d. 19 Juni 2005	Dalam Daerah	Agus Irawan	180.000,00
17-Jun-05	17 s.d. 19 Juni 2005	Dalam Daerah	Sahren AW	150.000,00
17-Jun-05	17 s.d. 19 Juni 2005	Dalam Daerah	Udin Syafruddin	180.000,00
17-Jun-05	17 s.d. 19 Juni 2005	Dalam Daerah	Suraiyah	150.000,00
17-Jun-05	17 s.d. 19 Juni 2005	Dalam Daerah	Syahrul Mustafa	180.000,00
17-Jun-05	17 s.d. 19 Juni 2005	Dalam Daerah	Syaifullah	135.000,00
17-Jun-05	17 s.d. 19 Juni 2005	Dalam Daerah	Ahyar	135.000,00
17-Jun-05	17 s.d. 19 Juni 2005	Dalam Daerah	Burhanuddin Jebang,SH	150.000,00
17-Jun-05	17 s.d. 19 Juni 2005	Dalam Daerah	Harjito	135.000,00
17-Jun-05	17 s.d. 19 Juni 2005	Dalam Daerah	Aan Hidayat	135.000,00
20-Jun-05	20 s.d 21 Juni 2005	Dalam Daerah	Fud Syaifuddin,ST	120.000,00
20-Jun-05	20 s.d 21 Juni 2005	Dalam Daerah	Arifin	100.000,00
20-Jun-05	20 s.d 21 Juni 2005	Dalam Daerah	Agus Irawan	120.000,00

1	2	3	4	5
20-Jun-05	20 s.d 21 Juni 2005	Dalam Daerah	Sahren AW	100.000,00
20-Jun-05	20 s.d 21 Juni 2005	Dalam Daerah	Udin Syafruddin	120.000,00
20-Jun-05	20 s.d 21 Juni 2005	Dalam Daerah	Suraiyah	100.000,00
20-Jun-05	20 s.d 21 Juni 2005	Dalam Daerah	Syahrul Mustafa	120.000,00
20-Jun-05	20 s.d 21 Juni 2005	Dalam Daerah	Syaifullah	90.000,00
20-Jun-05	20 s.d 21 Juni 2005	Dalam Daerah	Ahyar	90.000,00
20-Jun-05	20 s.d 21 Juni 2005	Dalam Daerah	Burhanuddin Jebang,SH	100.000,00
20-Jun-05	20 s.d 21 Juni 2005	Dalam Daerah	M.Buchari	100.000,00
20-Jun-05	20 s.d 21 Juni 2005	Dalam Daerah	Harjito	90.000,00
20-Jun-05	20 s.d 21 Juni 2005	Dalam Daerah	Aan Hidayat	90.000,00
22-Jun-05	22 s.d. 23 Juni 2005	Dalam Daerah	Fud Syaifuddin,ST	120.000,00
22-Jun-05	22 s.d. 23 Juni 2005	Dalam Daerah	Arifin	100.000,00
22-Jun-05	22 s.d. 23 Juni 2005	Dalam Daerah	Agus Irawan	120.000,00
22-Jun-05	22 s.d. 23 Juni 2005	Dalam Daerah	Sahren AW	100.000,00
22-Jun-05	22 s.d. 23 Juni 2005	Dalam Daerah	Udin Syafruddin	120.000,00
22-Jun-05	22 s.d. 23 Juni 2005	Dalam Daerah	Suraiyah	100.000,00
22-Jun-05	22 s.d. 23 Juni 2005	Dalam Daerah	Syahrul Mustafa	120.000,00
22-Jun-05	22 s.d. 23 Juni 2005	Dalam Daerah	Syaifullah	90.000,00
22-Jun-05	22 s.d. 23 Juni 2005	Dalam Daerah	Ahyar	90.000,00
22-Jun-05	22 s.d. 23 Juni 2005	Dalam Daerah	Burhanuddin Jebang,SH	100.000,00
22-Jun-05	22 s.d. 23 Juni 2005	Dalam Daerah	M.Buchari	100.000,00
22-Jun-05	22 s.d. 23 Juni 2005	Dalam Daerah	Harjito	90.000,00
22-Jun-05	22 s.d. 23 Juni 2005	Dalam Daerah	Aan Hidayat	90.000,00
27-Jun-05	27 s.d. 29 Juni 2005	Dalam Daerah	Fud Syaifuddin,ST	180.000,00
27-Jun-05	27 s.d. 29 Juni 2005	Dalam Daerah	Suraiyah	150.000,00
27-Jun-05	27 s.d. 29 Juni 2005	Dalam Daerah	Arsitawati	135.000,00
27-Jun-05	27 s.d. 29 Juni 2005	Dalam Daerah	Hasdar	135.000,00
27-Jun-05	27 s.d. 29 Juni 2005	Dalam Daerah	Udin Syafruddin	180.000,00
27-Jun-05	27 s.d. 29 Juni 2005	Dalam Daerah	Harjito	135.000,00
27-Jun-05	27 s.d. 29 Juni 2005	Dalam Daerah	Aan Hidayat	135.000,00
27-Jun-05	27 s.d. 29 Juni 2005	Dalam Daerah	Agus Irawan	180.000,00
27-Jun-05	27 s.d. 29 Juni 2005	Dalam Daerah	Arifin	150.000,00
27-Jun-05	27 s.d. 29 Juni 2005	Dalam Daerah	Syahrul Mustafa	180.000,00
27-Jun-05	27 s.d. 29 Juni 2005	Dalam Daerah	Sahren AW	150.000,00
27-Jun-05	27 s.d. 29 Juni 2005	Dalam Daerah	Syaifullah	135.000,00
27-Jun-05	27 s.d. 29 Juni 2005	Dalam Daerah	Ahyar	135.000,00
27-Jun-05	27 s.d. 29 Juni 2005	Dalam Daerah	M.Buchari	150.000,00
27-Jun-05	27 s.d. 29 Juni 2005	Dalam Daerah	Nuryati	150.000,00
				14.920.000,00
Juli				
12-Jul-05	12 s.d. 18 Juli 2005	Jakarta	Fud Syarifuddin	4.730.000,00
12-Jul-05	12 s.d. 18 Juli 2005	Jakarta	Agus Irawan	4.730.000,00
12-Jul-05	12 s.d. 18 Juli 2005	Jakarta	Syahrul Mustafa	4.730.000,00
12-Jul-05	12 s.d. 18 Juli 2005	Jakarta	Udin Syarifuddin	4.730.000,00
23-Jul-05	23 s.d. 29 Jul 2005	Jakarta	Syaifullah	4.030.000,00
25-Jul-05	25 s.d. 31 JUL 2005	Jakarta	M.Buchari	4.380.000,00
25-Jul-05	25 s.d 29 Jul 2005	Mataram	Agus Irawan	950.000,00
25-Jul-05	25 s.d 29 Jul 2005	Mataram	Fud Syarifuddin	950.000,00
25-Jul-05	25 s.d 29 Jul 2005	Mataram	Syahrul Mustafa	950.000,00
25-Jul-05	25 s.d 29 Jul 2005	Mataram	Arifin	825.000,00
25-Jul-05	25 s.d 29 Jul 2005	Mataram	Nuryati	825.000,00
25-Jul-05	25 s.d 29 Jul 2005	Mataram	Sahren AW	825.000,00
				32.655.000,00
Agustus				
03-Agust-05	3 s.d. 5 Agustus 2005	Mataram	Burhanuddin Jebang	825.000,00
03-Agust-05	3 s.d. 5 Agustus 2005	Mataram	Fud Syaifuddin	950.000,00
03-Agust-05	3 s.d. 5 Agustus 2005	Mataram	Agus Irawan	950.000,00
03-Agust-05	3 s.d. 5 Agustus 2005	Mataram	Syahrul Mustafa	950.000,00

1	2	3	4	5
06-Agust-05	6 s.d. 10 Agustus 2005	Mataram	Burhanuddin Jebang	825.000,00
06-Agust-05	6 s.d 12 Agustus 2005	Jakarta	Sahren AW	4.380.000,00
06-Agust-05	6 s.d 12 Agustus 2005	Jakarta	Arifin	4.380.000,00
06-Agust-05	6 s.d 12 Agustus 2005	Jakarta	Suraiyah	4.380.000,00
06-Agust-05	6 s.d 12 Agustus 2005	Jakarta	Syaifullah	4.030.000,00
20-Agust-05	20 s.d. 27 Agustus 2005	Jakarta	Burhanuddin Jebang	4.380.000,00
20-Agust-05	20 s.d. 27 Agustus 2005	Jakarta	Fud Syaifuddin	4.730.000,00
20-Agust-05	20 s.d. 27 Agustus 2005	Jakarta	Agus Irawan	4.730.000,00
20-Agust-05	20 s.d. 27 Agustus 2005	Jakarta	Arifin	4.380.000,00
29-Agust-05	29 Agt s.d. 2 Sept. 2005	Mataram	Suraiyah	825.000,00
29-Agust-05	29 Agt s.d. 2 Sept. 2005	Mataram	Syaifullah	700.000,00
				41.415.000,00
September				
09-Sep-05	9 s.d. 13 September	Mataram	Burhanuddin Jebang	825.000,00
09-Sep-05	9 s.d. 13 September	Mataram	Fud Syaifuddin	950.000,00
				1.775.000,00
Oktober				
26-Okt-05	26 Okt s.d. 1 Nop 2005	Jakarta	Burhanudin Jebang	4.380.000,00
26-Okt-05	26 Okt s.d. 1 Nop 2005	Jakarta	Sahren AW	4.380.000,00
26-Okt-05	26 Okt s.d. 1 Nop 2005	Jakarta	Suraiyah	4.380.000,00
26-Okt-05	26 Okt s.d. 1 Nop 2005	Jakarta	Syaifullah	4.030.000,00
				17.170.000,00
Nopember				
11-Nop-05	11 s.d. 17 Nop 2005	Jakarta	Burhanudin Jebang	4.380.000,00
11-Nop-05	11 s.d. 17 Nop 2005	Jakarta	Fud Syaifuddin	4.730.000,00
11-Nop-05	11 s.d. 17 Nop 2005	Jakarta	Agus Irawan	4.730.000,00
11-Nop-05	11 s.d. 17 Nop 2005	Jakarta	Syahrul Mustafa	4.730.000,00
26-Nop-05	26 s.d. 30 Nop 2005	Mataram	Burhanudin Jebang	950.000,00
26-Nop-05	26 s.d. 30 Nop 2005	Mataram	Fud Syaifuddin	950.000,00
26-Nop-05	26 s.d. 30 Nop 2005	Mataram	Agus Irawan	950.000,00
26-Nop-05	26 s.d. 30 Nop 2005	Mataram	Syahrul Mustafa	950.000,00
26-Nop-05	26 s.d. 30 Nop 2005	Mataram	Khaeruddin	950.000,00
				23.320.000,00
	Jumlah A			220.140.000,00
B. PPK Seteluk				
Mei				
17-Mei-05	17-Mei-05	Dalam Daerah	Syarifuddin	50.000,00
17-Mei-05	17-Mei-05	Dalam Daerah	Agustiawan	50.000,00
17-Mei-05	17-Mei-05	Dalam Daerah	Syamsul Rijal	50.000,00
17-Mei-05	17-Mei-05	Dalam Daerah	Ibnu Mulkan	50.000,00
17-Mei-05	17-Mei-05	Dalam Daerah	Ilham	50.000,00
17-Mei-05	17-Mei-05	Dalam Daerah	Ahmad Saibun	45.000,00
18-Mei-05	18 s.d. 19 Mei 2005	Dalam Daerah	Syarifuddin	100.000,00
18-Mei-05	18 s.d. 19 Mei 2005	Dalam Daerah	Ilham	100.000,00
18-Mei-05	18 s.d. 19 Mei 2005	Dalam Daerah	Masdar Arma	90.000,00
18-Mei-05	18 s.d. 19 Mei 2005	Dalam Daerah	Nandang Suheli	100.000,00
20-Mei-05	20 s.d. 21 Mei 2005	Dalam Daerah	Agustiawan	40.000,00
20-Mei-05	20 s.d. 21 Mei 2005	Dalam Daerah	Ibnu Mulkan	40.000,00
27-Mei-05	27 s.d. 28 Mei 2005	Dalam Daerah	Agustiawan	100.000,00
27-Mei-05	27 s.d. 28 Mei 2005	Dalam Daerah	Ibnu Mulkan	100.000,00
27-Mei-05	27 s.d. 28 Mei 2005	Dalam Daerah	Ahmad Saibun	90.000,00
30-Mei-05	30 s.d. 31 Mei 2005	Dalam Daerah	Masdar Arma	90.000,00
30-Mei-05	30 s.d. 31 Mei 2005	Dalam Daerah	Eny Nuraini	90.000,00
				1.235.000,00

1	2	3	4	5
Juni				
08-Jun-05	08-Jun-05	Dalam Daerah	Masdar Arma	45.000,00
08-Jun-05	08-Jun-05	Dalam Daerah	Eny Nuraini	45.000,00
08-Jun-05	8 s.d. 9 Juni 2005	Dalam Daerah	Syarifuddin	100.000,00
08-Jun-05	8 s.d. 9 Juni 2005	Dalam Daerah	Nandang Suheli	100.000,00
08-Jun-05	8 s.d. 9 Juni 2005	Dalam Daerah	Agustiawan	100.000,00
08-Jun-05	8 s.d. 9 Juni 2005	Dalam Daerah	Ahmad Saibun	100.000,00
22-Jun-05	22 s.d. 23 Juni 2005	Dalam Daerah	Nandang Suheli	100.000,00
22-Jun-05	22 s.d. 23 Juni 2005	Dalam Daerah	Syarifuddin	100.000,00
				690.000,00
Juli				
06-Jul-05	6 s.d. 7 Juli 2005	Dalam Daerah	Ilham	100.000,00
06-Jul-05	6 s.d. 7 Juli 2005	Dalam Daerah	Syamsul Rijal	100.000,00
06-Jul-05	6 s.d. 7 Juli 2005	Dalam Daerah	Ibnu Mulkan	100.000,00
13-Jul-05	13 s.d. 14 Juli 2005	Dalam Daerah	Syarifuddin	100.000,00
13-Jul-05	13 s.d. 14 Juli 2005	Dalam Daerah	Agustiawan	100.000,00
13-Jul-05	13 s.d. 14 Juli 2005	Dalam Daerah	Nandang Suheli	100.000,00
13-Jul-05	13 s.d. 14 Juli 2005	Dalam Daerah	Ahmad Saibun	100.000,00
				700.000,00
	Jumlah B			2.625.000,00
C. PPK Brang Rea				
Juni				
04-Jun-05	4 s.d. 6 Juni 2005	Dalam Daerah	Herman Jayadi	150.000,00
04-Jun-05	4 s.d. 6 Juni 2005	Dalam Daerah	Novi Apriani	150.000,00
04-Jun-05	4 s.d. 6 Juni 2005	Dalam Daerah	Nenni Kurniawati	150.000,00
04-Jun-05	4 s.d. 6 Juni 2005	Dalam Daerah	Zulkifli	150.000,00
04-Jun-05	4 s.d. 6 Juni 2005	Dalam Daerah	Nurjahman	150.000,00
09-Jun-05	9 s.d. 11 Juni 2005	Dalam Daerah	Herman Jayadi	150.000,00
09-Jun-05	9 s.d. 11 Juni 2005	Dalam Daerah	Nurjahman	150.000,00
09-Jun-05	9 s.d. 11 Juni 2005	Dalam Daerah	Zulkifli	150.000,00
09-Jun-05	9 s.d. 11 Juni 2005	Dalam Daerah	Nenni Kurniawati	150.000,00
09-Jun-05	9 s.d. 11 Juni 2005	Dalam Daerah	Novi Apriani	150.000,00
13-Jun-05	13-Jun-05	Dalam Daerah	Syamsudin	50.000,00
				1.550.000,00
September				
14-Jun-05	14 s.d. 16 Juni 2005	Dalam Daerah	Herman Jayadi	150.000,00
14-Jun-05	14 s.d. 16 Juni 2005	Dalam Daerah	Nurjahman	150.000,00
14-Jun-05	14 s.d. 16 Juni 2005	Dalam Daerah	Zulkifli	150.000,00
14-Jun-05	14 s.d. 16 Juni 2005	Dalam Daerah	Nenni Kurniawati	150.000,00
14-Jun-05	14 s.d. 16 Juni 2005	Dalam Daerah	Novi Apriani	150.000,00
14-Jun-05	14 s.d. 16 Juni 2005	Dalam Daerah	Arifin	150.000,00
14-Jun-05	14 s.d. 16 Juni 2005	Dalam Daerah	Abdullah	135.000,00
14-Jun-05	14 s.d. 16 Juni 2005	Dalam Daerah	Budi Sunarko	135.000,00
				1.170.000,00
	JUMLAH C			2.720.000,00
	TOTAL			225.485.000,00

**LAPORAN SISA BARANG PERSEDIAAN PAKAI HABIS KEGIATAN PILKADA
PADA KPUD KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

No.	Jenis Barang	Merk/Tipe Satuan	Tgl/No Kwitansi, SPK, Kontrak	Jumlah Pengadaan		Jumlah (Rp)	Pegguna Barang	Penggunaan (Unit)	Sisa (Unit)	Kondisi Sisa	Nilai Sisa (Rp)
				Unit	H.Satuan						
1	2	3	4	5	6	7=5X6	8	9	10=5-9	11	12 (6x10)
1	Cetakan & Penggandaan		31/05/2005								
	Surat Suara	lbr	027/01/SPK/Sek-KPU/2005	70.154,00	1.045,00	73.310.930,00	KPUD	70.154,00	-	-	
	Form A KWK	lbr	CV, DINAMIKA	4.216,00	159,91	674.167,91	KPUD	4.216,00	-	-	
	Form B KWK	lbr		720,00	159,91	115.133,04	KPUD	720,00	-	-	
	Form C KWK	lbr		96.720,00	159,91	15.466.205,04	KPUD	91.599,00	5.121,00	baik	818.88:
	Lam. Model C KWK B	lbr		992,00	1.210,00	1.200.320,00	KPUD	780,00	212,00	baik	256.52:
	Formulir D KWK	lbr		4.144,00	159,91	662.654,61	KPUD	3.700,00	444,00	baik	70.99:
	Lam. Model D2 KWK B	lbr		296,00	1.210,00	358.160,00	KPUD	296,00	-	-	
	Formulir DA KWK	lbr		640,00	159,91	102.340,48	KPUD	640,00	-	-	
	Model DA 1 KWK Besar	lbr		40,00	1.210,00	48.400,00	KPUD	40,00	-	-	
	Formulir DB KWK	lbr		136,00	159,91	21.747,35	KPUD	136,00	-	-	
	Model DB 1 KWK Besar	lbr		8,00	1.210,00	9.680,00	KPUD	8,00	-	-	
2	Pengadaan		31/05/2005								
	Sampul dan Segel	lbr	SPK/027/05/SPK/Sek-KPU/2005	248,00	22.000,00	5.456.000,00	KPUD	195,00	53,00	baik	1.166.00:
	Stiker kotak suara	lbr	CV, DINAMIKA	992,00	5.410,00	5.366.720,00	KPUD	780,00	212,00	baik	1.146.92:
3	Pengadaan Juknis &		31/05/2005								
	Buku Peraturan		SPK/027/07/SPK/Sek-KPU/2005								
	- Kabupaten	lbr	UD. PARAHYANGAN	100,00	9.900,00	990.000,00	KPUD	100,00	-	-	
	- PPK	lbr		125,00	9.900,00	1.237.500,00	KPUD	125,00	-	-	
	-PPS	lbr		185,00	9.900,00	1.831.500,00	KPUD	185,00	-	-	
	-KPPS / TPS	lbr		1.240,00	9.900,00	12.276.000,00	KPUD	1.240,00	-	-	
4	Layout Disain Gambar	lbr	31/05/2005								
	Layout/Disain Cover	lbr	SPK/027/08/SPK/Sek-KPU/2005	500,00	9.191,00	4.595.500,00	KPUD	450,00	50,00	baik	459.55:
	Layout/ disain Tata Letak	lbr	UD. PRAHYANGAN	500,00	9.191,00	4.595.500,00	KPUD	450,00	50,00	baik	459.55:
	Gambar	lbr									
5	Perlengkapan KPPS	bt	31/05/2005	496,00	22.177,42	11.000.000,00	KPUD	409,00	87,00	baik	1.929.43:
	TPS Tanda Khusus		SPK/027/03/SPK/Sek-KPU/2005								
	(Tinta Pilkada)		UD. SUARA NUSA NIAGA. N								
6	Penerangan penyuluhan	lbr	31/05/2005	125,00	200.000,00	25.000.000,00	KPUD	125,00	-	-	
	sosialisasi via spanduk		027/02/SPK/Sek-SPK/2005								
			UD. AKBAR PRATAMA								
7	Tanda Pengenal		31/05/2005								
	PPK	lbr	SPK/04/SPK/Sek-KPU/2005	25,00	3.409,20	85.230,00	KPUD	25,00	-	-	
	PPS/KPPS	lbr	UD. AKBAR PRATAMA	111,00	3.409,20	378.421,20	KPUD	111,00	-	-	
	Keamanan	lbr		496,00	3.409,20	1.690.963,20	KPUD	390,00	106,00	baik	361.37:
	Panitia	lbr		1.736,00	3.409,20	5.918.371,20	KPUD	761,00	975,00	baik	3.323.97:
	Saksi			1.240,00	3.409,20	4.227.408,00	KPUD	265,00	975,00	baik	3.323.97:
8	Penc & penggandaan	lbr	31/05/2005	66.302,00	990,00	65.638.980,00	KPUD	66.302,00	-	-	
	Kartu Pemilih		SPK/027/06/SPK/Sek-KPU/2005								
	Cetak Kartu Pemilih	bh	25/06/2005	10.545,00	990,00	10.439.550,00	KPUD		-	-	

1	2	3	4	5	6	7=5X6	8	9	10=5-9	11	12 (6x10)
9	Bolpoin	bh	13/06/2005	580,00	3.000,00	1.740.000,00	KPUD	534,00	46,00	baik	138.000
	Gembok	bh	PAN.II/11/KPU/2005	248,00	5.000,00	1.240.000,00	KPUD	199,00	49,00	baik	245.000
			UD.ALFIN								
10	Foto Copy	lbr	19/06/2005	19.961,00	-	3.331.100,00	KPUD	19.961,00	-	-	
	Penjilidan	exp	PAN.II/11/KPU/2005	534,00				534,00			
			UD.ALFIN								
11	Foto Copy	lbr	14/06/2005	25.815,00		3.956.500,00	KPUD	25.815,00	-	-	
	Penjilidan	exp	PAN.II/11/KPU/2005	550,00				550,00	-	-	
			UD.ALFIN								
12	Lem Kertas	bh	13/06/2005	580,00	4.000,00	2.320.000,00	KPUD	533,00	47,00	baik	188.000
	Tali / Gelang	kg	PAN.II/11/KPU/2005	5,00	25.000,00	125.000,00	KPUD	5,00	-	-	
	Spidol	bh	UD.FANTASI	580,00	2.291,00	1.328.780,00	KPUD	510,00	70,00	baik	160.370
	Tas Plastik	pcs		10,00	25.000,00	250.000,00	KPUD	10,00	-	-	
13	Bantal	bh	13/06/2005	744,00	6.250,00	4.650.000,00	KPUD	585,00	159,00	baik	993.750
	Alat Pencoblos	kg	PAN.II/11/KPU/2005	15,00	12.500,00	187.500,00	KPUD	15,00	-	-	
14	Penyediaan	unit	15/06/2005	1,00		1.820.000,00	KPUD	1,00	-	-	
	Acara Debat Kandidat		PAN.II/11/KPU/2005					-			
			CV. PINAS								
15	Pembelian ATK DPS/DPT	paket	06/06/2005	1,00	3.962.500,00	3.962.500,00	OPT/DPS	1,00	-	-	
			PAN.II/26/KPU/2005								
			CV. PANJI ABDI								
16	Poster Tata Cara Coblos dan Kampanye	bh	02/06/2005	1.000,00	2.500,00	2.500.000,00	KPUD	1.000,00	-	-	
			PAN.II/29/KPU/2005								
			UD. DINAMIKA								
17	Biaya Pembuatan stiker		02/06/2005	1.600,00	1.250,00	2.000.000,00	KPUD	1.600,00	-	-	
			PAN.II/33/KPU/2005								
18	Pembuatan poster	bh	02/06/2005	750,00	5.000,00	3.750.000,00	KPUD	750,00	-	-	
	Calon		PAN.II/34/KPU/2005								
			UD. DINAMIKA								
19	Foto Copy	lbr	30/06/2005	11.070,00	100,00	1.107.000,00	KPUD	11.070,00	-	-	
	Penjilidan	exp	PAN.II/36/KPU/2005	48,00	2.500,00	120.000,00	KPUD	48,00	-	-	
20	Cetak Surat Sisa Tamb.		25/06/2005	3.500,00	1.045,00	3.657.500,00	KPUD	1.902,00	1.598,00	baik	1.669.910
			PAN.II/27/Sek-KPU/2005								
			UD.DINAMIKA								
21	Penggandaan Tabel Copy		24/06/2005	46.800,00	100,00	4.680.000,00	KPUD	46.800,00	-	-	
			PAN.II/28/Sek-KPU/2005								
	Jumlah					295.423.262,03					16.712.200

**DAFTAR BUKTI SPPD YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN
PADA KPUD KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

Tanggal	Waktu	Tujuan	Atas Nama	Jumlah
1	2	3	4	5
14-Jul-05	14 s.d. 16 Juli 2005	Dalam Daerah	Arman Wijaya	150.000,00
14-Jul-05	14 s.d. 16 Juli 2005	Dalam Daerah	Roy Marhandra	150.000,00
14-Jul-05	14 s.d. 16 Juli 2005	Dalam Daerah	Nasrullah	150.000,00
23-Jul-05	23 s.d. 25 Juli 2005	Dalam Daerah	Arman Wijaya	150.000,00
23-Jul-05	23 s.d. 25 Juli 2005	Dalam Daerah	Roy Marhandra	150.000,00
23-Jul-05	23 s.d. 25 Juli 2005	Dalam Daerah	Nasrullah	150.000,00
11-Jul-05	11 s.d. 13 Juli 2005	Dalam Daerah	Arman Wijaya	150.000,00
11-Jul-05	11 s.d. 13 Juli 2005	Dalam Daerah	Roy Marhandra	150.000,00
11-Jul-05	11 s.d. 13 Juli 2005	Dalam Daerah	Nasrullah	150.000,00
08-Jul-05	8 s.d. Juli 2005	Dalam Daerah	Arman Wijaya	150.000,00
08-Jul-05	8 s.d. Juli 2005	Dalam Daerah	Roy Marhandra	150.000,00
08-Jul-05	8 s.d. Juli 2005	Dalam Daerah	Nasrullah	150.000,00
05-Jul-05	5 s.d. 7 Juli 2005	Dalam Daerah	Arman Wijaya	150.000,00
05-Jul-05	5 s.d. 7 Juli 2005	Dalam Daerah	Roy Marhandra	150.000,00
05-Jul-05	5 s.d. 7 Juli 2005	Dalam Daerah	Nasrullah	150.000,00
02-Jul-05	2 s.d. 4 Juli 2005	Dalam Daerah	Arman Wijaya	150.000,00
02-Jul-05	2 s.d. 4 Juli 2005	Dalam Daerah	Roy Marhandra	150.000,00
02-Jul-05	2 s.d. 4 Juli 2005	Dalam Daerah	Nasrullah	150.000,00
29-Jun-05	29 Juni s.d. 1 Juli 05	Dalam Daerah	Arman Wijaya	150.000,00
29-Jun-05	29 Juni s.d. 1 Juli 05	Dalam Daerah	Roy Marhandra	150.000,00
29-Jun-05	29 Juni s.d. 1 Juli 05	Dalam Daerah	Nasrullah	150.000,00
26-Jun-05	26 s.d. 28 Juni 2005	Dalam Daerah	Arman Wijaya	150.000,00
26-Jun-05	26 s.d. 28 Juni 2005	Dalam Daerah	Roy Marhandra	150.000,00
26-Jun-05	26 s.d. 28 Juni 2005	Dalam Daerah	Nasrullah	150.000,00
23-Jun-05	23 s.d. 25 Juni 2005	Dalam Daerah	Arman Wijaya	150.000,00
23-Jun-05	23 s.d. 25 Juni 2005	Dalam Daerah	Roy Marhandra	150.000,00
23-Jun-05	23 s.d. 25 Juni 2005	Dalam Daerah	Nasrullah	150.000,00
14-Jul-05	14 s.d. 16 Juli 2005	Dalam Daerah	M. Yunan	150.000,00
14-Jul-05	14 s.d. 16 Juli 2005	Dalam Daerah	Mustika Jaya	150.000,00
14-Jul-05	14 s.d. 16 Juli 2005	Dalam Daerah	Wayan Terima	150.000,00
18-Jul-05	18 s.d. 20 Juli 2005	Dalam Daerah	M. Yunan	150.000,00
18-Jul-05	18 s.d. 20 Juli 2005	Dalam Daerah	Mustika Jaya	150.000,00
18-Jul-05	18 s.d. 20 Juli 2005	Dalam Daerah	Wayan Terima	150.000,00
28-Jul-05	29 s.d. 30 Juli 2005	Dalam Daerah	M. Yunan	150.000,00
28-Jul-05	29 s.d. 30 Juli 2005	Dalam Daerah	Mustika Jaya	150.000,00
28-Jul-05	29 s.d. 30 Juli 2005	Dalam Daerah	Wayan Terima	150.000,00
25-Jul-05	25 s.d. 27 Juli 2005	Dalam Daerah	M. Yunan	150.000,00
25-Jul-05	25 s.d. 27 Juli 2005	Dalam Daerah	Mustika Jaya	150.000,00
25-Jul-05	25 s.d. 27 Juli 2005	Dalam Daerah	Wayan Terima	150.000,00
30-Jun-05	30 Juni s.d. 2 Juli 2005	Dalam Daerah	M. Yunan	150.000,00
30-Jun-05	30 Juni s.d. 2 Juli 2005	Dalam Daerah	Mustika Jaya	150.000,00
30-Jun-05	30 Juni s.d. 2 Juli 2005	Dalam Daerah	Wayan Terima	150.000,00
21-Jul-05	21 s.d. 23 Juli 2005	Dalam Daerah	M. Yunan	150.000,00
21-Jul-05	21 s.d. 23 Juli 2005	Dalam Daerah	Mustika Jaya	150.000,00
21-Jul-05	21 s.d. 23 Juli 2005	Dalam Daerah	Wayan Terima	150.000,00
27-Jun-05	27 s.d. 29 Juni 2005	Dalam Daerah	M. Yunan	150.000,00
27-Jun-05	27 s.d. 29 Juni 2005	Dalam Daerah	Mustika Jaya	150.000,00
27-Jun-05	27 s.d. 29 Juni 2005	Dalam Daerah	Wayan Terima	150.000,00

1	2	3	4	5
04-Jul-05	4 s.d. 6 Juli 2005	Dalam Daerah	M. Yunan	150.000,00
04-Jul-05	4 s.d. 6 Juli 2005	Dalam Daerah	Mustika Jaya	150.000,00
04-Jul-05	4 s.d. 6 Juli 2005	Dalam Daerah	Wayan Terima	150.000,00
07-Jul-05	7 s.d. 9 Juli 2005	Dalam Daerah	M. Yunan	150.000,00
07-Jul-05	7 s.d. 9 Juli 2005	Dalam Daerah	Mustika Jaya	150.000,00
07-Jul-05	7 s.d. 9 Juli 2005	Dalam Daerah	Wayan Terima	150.000,00
28-Jun-05	28 s.d. 30 Juni 2005	Dalam Daerah	Ade Jaya	150.000,00
28-Jun-05	28 s.d. 30 Juni 2005	Dalam Daerah	Hamzah Halidi	150.000,00
28-Jun-05	28 s.d. 30 Juni 2005	Dalam Daerah	Lutfi Amrullah	150.000,00
12-Jul-05	12 s.d. 14 Juli 2005	Dalam Daerah	Ade Jaya	150.000,00
12-Jul-05	12 s.d. 14 Juli 2005	Dalam Daerah	Hamzah Halidi	150.000,00
12-Jul-05	12 s.d. 14 Juli 2005	Dalam Daerah	Lutfi Amrullah	150.000,00
20-Jun-05	20 s.d. 24 Juni 2005	Mataram	Ramli Sarbini	950.000,00
20-Jun-05	20 s.d. 24 Juni 2005	Mataram	Bayu Adhi J	950.000,00
20-Jun-05	20 s.d. 24 Juni 2005	Mataram	Burhanuddin	950.000,00
20-Jun-05	20 s.d. 24 Juni 2005	Mataram	Yuyun Nurul Azmi	950.000,00
20-Jun-05	20 s.d. 24 Juni 2005	Mataram	Agus Sudono	950.000,00
18-Jul-05	18 s.d. 20 Juli 2005	Dalam Daerah	Ramli Sarbini	180.000,00
18-Jul-05	18 s.d. 20 Juli 2005	Dalam Daerah	Bayu Adhi J	180.000,00
18-Jul-05	18 s.d. 20 Juli 2005	Dalam Daerah	Burhanuddin	180.000,00
18-Jul-05	18 s.d. 20 Juli 2005	Dalam Daerah	Yuyun Nurul Azmi	180.000,00
18-Jul-05	18 s.d. 20 Juli 2005	Dalam Daerah	Agus Sudono	180.000,00
12-Jul-05	12 s.d. 14 Juli 2005	Dalam Daerah	Ramli Sarbini	180.000,00
12-Jul-05	12 s.d. 14 Juli 2005	Dalam Daerah	Bayu Adhi J	180.000,00
12-Jul-05	12 s.d. 14 Juli 2005	Dalam Daerah	Burhanuddin	180.000,00
12-Jul-05	12 s.d. 14 Juli 2005	Dalam Daerah	Yuyun Nurul Azmi	180.000,00
12-Jul-05	12 s.d. 14 Juli 2005	Dalam Daerah	Agus Sudono	180.000,00
	TOTAL			15.550.000,00

**ANGGARAN DAN REALISASI
BELANJA OPERASIONAL PILKADA
PADA KPUD KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

No	Pos Belanja	Anggaran (Rp)	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Sisa Kas (Rp)
1	2	3	4	5	6 (3-5)	7 (4-5)
I.	HONORARIUM	843.700.000	622.550.000	606.900.000	236.800.000	15.650.000
	1) KPU Kabupaten	39.000.000	39.000.000	31.500.000	7.500.000	7.500.000
	2) Sekretariat KPU	29.400.000	29.150.000	27.250.000	2.150.000	1.900.000
	3) PPK	54.000.000	54.000.000	54.000.000	-	-
	4) Sekretariat PPK	21.750.000	19.500.000	20.250.000	1.500.000	(750.000)
	5) PPS	144.300.000	144.300.000	144.300.000	-	-
	6) Sekretariat PPS	111.000.000	55.500.000	74.000.000	37.000.000	(18.500.000)
	7) KPPS	235.700.000	190.000.000	185.250.000	50.450.000	4.750.000
	8) Kelompok Kerja (Pokja)	20.000.000	20.000.000		20.000.000	20.000.000
	9) Uang Lembur	188.550.000	71.100.000	70.350.000	118.200.000	750.000
II.	BELANJA BARANG DAN JASA	320.410.900	249.192.900	207.229.280	113.181.620	41.963.620
1	Barang Cetak / Penggandaan	217.706.900	150.389.400	121.931.000	95.775.900	28.458.400
	1) Cetak Surat Suara	106.246.500	105.231.000	77.090.978	29.155.522	28.140.022
	2) Penggandaan Formulir	18.658.400	18.658.400	18.505.022	153.378	153.378
	3) Penggandaan Juknis dan Peraturan Perundangan	26.500.000	26.500.000	26.335.000	165.000	165.000
	4) Cetak Kartu Pemilih*)	63.145.000	-	-	63.145.000	-
	5) Cetak Kartu Pemilih tambahan*)	3.157.000	-	-	3.157.000	-
2	Perlengkapan KPPS/TPS	54.524.000	54.524.000	49.441.280	5.082.720	5.082.720
3	Pengangkutan	19.380.000	19.380.000	17.040.000	2.340.000	2.340.000
4	Pemeliharaan	18.000.000	16.200.000	13.899.500	4.100.500	2.300.500
	1) Gedung Kantor / Inventaris	7.200.000	5.400.000	3.800.000	3.400.000	1.600.000
	2) Kendaraan Roda 4 dan 2	10.800.000	10.800.000	10.099.500	700.500	700.500
5	10 BBM	10.800.000	8.699.500	4.917.500	5.882.500	3.782.000
	1) Roda 4	7.200.000	6.000.000	3.600.000	3.600.000	2.400.000
	2) Roda 2	3.600.000	2.699.500	1.317.500	2.282.500	1.382.000
III.	BELANJA OPERASIONAL	1.102.212.700	766.892.550	694.826.300	407.386.400	72.066.250
1	Keperluan Perkantoran	404.960.000	249.772.790	234.996.800	169.963.200	14.775.990
	1) KPU Kabupaten:	171.000.000	122.852.790	112.926.800	58.073.200	9.925.990
	-Alat Tulis Kantor (ATK)	7.200.000	4.850.000	4.561.000	2.639.000	289.000
	-Listrik/Telepon/Air	10.800.000	1.800.000	1.765.800	9.034.200	34.200
	-Sidang/Rapat Biasa	18.000.000	7.002.790	2.800.000	15.200.000	4.202.790
	-Pengamanan Kantor	21.600.000	16.200.000	16.200.000	5.400.000	-
	-Biaya Pelelangan Peng.Barang/Jasa	9.000.000	-	9.000.000	-	(9.000.000)
	-Penyusunan Dokumen Hasil	10.800.000	-	-	10.800.000	-
	-Dokumentasi/Publikasi	3.600.000	3.000.000	3.600.000	-	(600.000)
	-Akuntan Publik	90.000.000	90.000.000	75.000.000	15.000.000	15.000.000
	2) PPK	17.400.000	17.400.000	14.400.000	3.000.000	3.000.000
	3) PPS	124.800.000	35.520.000	35.520.000	89.280.000	-
	4) KPPS	91.760.000	74.000.000	72.150.000	19.610.000	1.850.000
2	Pembentukan PPK, PPS & KPPS	11.305.000	10.560.000	8.557.500	2.747.500	2.002.500
3	Pengamanan Pencetakan, penyimpanan dan pendistribusian	35.400.000	25.786.250	17.480.000	17.920.000	8.306.250
4	Persipan Pemungutan Suara	23.685.850	22.801.660	21.729.500	1.956.350	1.072.160
5	Penerangan/Penyuluhan/Sosialisasi	111.531.300	112.531.300	88.820.000	22.711.300	23.711.300
6	Raker/Pelatihan	39.325.000	33.125.000	23.612.500	15.712.500	9.512.500
7	Advokasi Hukum	20.000.000	20.000.000	15.000.000	5.000.000	5.000.000
8	Perjalanan Dinas	404.805.000	256.115.000	248.105.000	156.700.000	8.010.000
9	Pencalonan	29.000.550	29.000.550	29.000.000	550	550
	1) Penelitian keabsahan Calon	16.500.000	16.500.000	16.500.000	-	-
	2) Pemeriksaan kesehatan Calon	7.500.000	7.500.000	7.500.000	-	-
	3) Pengumuman Pasangan Calon	5.000.550	5.000.550	5.000.000	550	550
10	Proses Berhitung Suara	7.200.000	7.200.000	5.025.000	2.175.000	2.175.000